

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu telah berhasil menyelesaikan penyusunan dokumen Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024.

Renja PD ini disusun untuk dijadikan pedoman dan acuan bagi setiap elemen Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu sebagai pelaksana fungsi penunjang bidang keuangan serta tugas pembantuan, dalam melaksanakan aktifitas, sehingga rencana penerimaan (target) yang telah ditetapkan dapat terpenuhi. Dan merupakan bentuk komitmen penuh organisasi untuk mencapai kinerja yang sebaik-baiknya dalam mewujudkan visi Kabupaten Luwu. Dengan demikian, dokumen Renja PD Tahun 2024 ini merupakan bagian tak terpisahkan dari dokumen-dokumen yang lain, seperti Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu.

Usaha maksimal telah dilakukan dalam penyusunan dokumen Renja PD Tahun 2024 ini, namun kami menyadari bahwa dokumen ini masih jauh dari sempurna dan memerlukan penyempurnaan- penyempurnaan lebih lanjut di masa mendatang. Oleh karena itu, masukan-masukan positif dan konstruktif bagi penyempurnaan dokumen ini tetap diperlukan. Akhirnya semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan kepada kita dalam melaksanakan tugas-tugas ke depan.

Belopa,
Kepala BAPENDA KAB. LUWU


ANDI HALANGGI, S.STP
PKT. PEMBINA TINGKAT I
NIP.198311142003121001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
BAB I.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II	7
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu dan Capaian Renstra Perangkat daerah	7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	18
2.3 Isu- isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD	21
2.4 Review terhadap rancangan awal RKPD	23
2.5 Penelaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	36
BAB III	39
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	39
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	39
3.3 Program dan Kegiatan	39
BAB IV	78
4.1 Rencana Kerja	78
4.2 Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah	79
BAB V	107

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah	16
Tabel 2. 2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu	19
Tabel 2. 3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Kabupaten Luwu	25
Tabel 3. 1 Tujuan dan sasaran renja perangkat daerah	39
Tabel 3. 2 Program dan kegiatan perangkat daerah Kab. Luwu 2024	Error! Bookmark not defined.
Tabel 4. 1 Indikator Tujuan/ Sasaran Tahun 2024.....	79
Tabel 4. 2 Rincian Belanja Pada setiap sub kegiatan.....	106

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai suatu upaya pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah selalu menggali dan mengembangkan semua potensi yang ada, terutama penerimaan yang berasal dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dengan tetap memperhatikan peningkatan kemampuan pembiayaan masyarakat dan dunia usaha. Hal ini sesuai dengan otonomi daerah yang berdasarkan undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah, Serta beberapa Peraturan Pemerintah yang berkaitan dengan pengaturan otonomi daerah tersebut, memberikan implikasi bahwa Pajak Daerah dan Retribusi merupakan salah satu sumber Penerimaan Pendapatan Daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan Daerah untuk menuju Kabupaten Luwu lebih Sejahtera, Maju dan Berdaya Saing. Dengan kata lain bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, kemampuan daerah untuk membiayai pembangunan, tentunya kemampuan menyiapkan Anggaran/Keuangan merupakan prioritas utama yang perlu dipikirkan. Konsekuensinya bagi setiap daerah harus memacu diri untuk meningkatkan Kemandiriannya dalam meningkatkan Penerimaan Asli Daerah (PAD) guna menopang Anggaran Belanja Daerah. Maka dari itu diupayakan yang maksimal dan berkesinambungan melalui peningkatan kinerja dan pengembangan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun dengan tahapan :

1. Persiapan penyusunan;
2. Penyusunan rancangan awal;
3. Penyusunan rancangan;
4. Pelaksanaan forum perangkat daerah/ lintas perangkat daerah;

5. Perumusan rancangan akhir; dan
6. Penetapan.

Dokumen rencana Kerja Tahun 2024 Merupakan Satu Kesatuan Yang tidak Terpisahkan Dengan peraturan Bupati No 55 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2024. Sehingga, dalam melakukan perubahan berpedoman Pada Peraturan Tersebut yang sudah Melalui Proses Tahapan Perencanaan Sesuai Ketentuan yang Berlaku.

Renja Perangkat Daerah di Jadikan Sebagai Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran(RKA) Perangkat Dearah Dan Kemudian Berubah Menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Melalui Penetapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD/P) Kabupaten Luwu.

Penyusunan Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2024 diawali dengan penyusunan rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah, orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah, penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja Perangkat Daerah, penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD

Mengingat arti strategis dokumen Renja Perangkat Daerah dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja Perangkat Daerah harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tentang Tata cara Perencanaan, pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Penyusunan Renja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2024 mengacu pada Rancangan Awal RKPD Kabupaten Luwu Tahun 2024 dan merupakan penjabaran dari Renstra Badan Pendapatan Daerah Tahun 2019-2024, yang tentunya mendukung Visi dan Misi Bupati. Badan Pendapatan Daerah berperan dalam mendukung Misi ke 1 Bupati Luwu yaitu Mewujudkan pemerintahan yang profesional, berwibawa, amanah, transparan, dan akuntabel.

1.2 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi dasar hukum Badan Pendapatan daerah kabupaten Luwu didalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang selanjutnya dimutakhirkan dengan Ketetapan Menteri Dalam Negeri Nomor 50-3708 tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil

Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2005-2025;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2019-2024;
12. Peraturan Bupati Luwu Nomor 112 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Kedudukan Jabatan dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Luwu;
13. Peraturan Bupati Luwu Nomor 67 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah
14. Peraturan Bupati Luwu Nomor 74 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2019-2024.
15. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024
16. Peraturan Bupati Luwu Nomor 55 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2024.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud dari Penyusunan Rencana kerja ini adalah sebagai pedoman penyusunan perencanaan anggaran program dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya dituangkan kedalam Rencana Kerja Anggaran (RKA).

1.3.2 Tujuan

Tujuan dari Penyusunan Renja Badan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

1. Untuk menjabarkan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024
2. Untuk menyusun program dan kegiatan yang direncanakan pada tahun anggaran 2024;
3. Menjadi alat untuk mengukur kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu tahun Sebelumnya

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Badan Pendapatan daerah Kabupaten Luwu disusun didalam sebuah dokumen deskriptif yang memuat data kualitatif dan kuantitatif, yang terdiri dari 4 BAB, yang meliputi :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah dengan Renja K/L, dan Renja Provinsi/Kabupaten/Kota serta tindak lanjut dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan penyusunan Renja Perangkat daerah.

1.4 Sistematika Penulisan Menguraikan Pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah susunan garis besar isi dokumen

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah

2.2 Analisa Pelayanan Perangkat daerah

2.3 Isu-Isu Penting Badan Pendapatan Daerah

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaah dan Kebijakan Nasional
- 3.2 Sasaran dan Tujuan Perangkat daerah
- 3.3 Program/kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- 4.1 Rencana Kerja
- 4.2 Pendanaan Perangkat Daerah

BAB VI PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa :

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan
- c. Rencana tindak lanjut

BAB II

PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu dan Capaian Renstra Perangkat daerah

Pada Tahun 2023 Pelaksanaan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah telah berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari capaian Sasaran Strategis Badan Pendapatan Daerah dimana Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah yang ditandai dengan terpenuhinya 5 Indikator Kinerja Utama yang meliputi, Rasio Realisasi PAD Terhadap target PAD, Persentase Peningkatan PAD, Realisasi Persentase PAD Terhadap Pendapatan daerah, Pendapatan Dana Perimbangan, Lain-lain Pendapatan yang Sah.

PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Tabel T-C.29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah
Tahun 2022
Kabupaten Luwu

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Capaian Program (Resntra Perangkat Daerah) Tahun 2019 – 2024		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Darah samapi dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (n-3)		Target dan Realisasi Konerja Program dan Kegaitan Tahun lalu 2022 (n-2)					Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-1)		Perkiraan Relisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan			
	(outcomes)/Kegiatan (Output)					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian program dan Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-1)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
		<i>K</i>	<i>Rp</i>	<i>K</i>	<i>Rp</i>	<i>K</i>	<i>Rp</i>	<i>K</i>	<i>Rp</i>	<i>K</i>	<i>K</i>	<i>Rp</i>	<i>K</i>	<i>Rp</i>	<i>K</i>	<i>Rp</i>
2	3	4		5		6		7		8 = 7/6	9		10 = 5 +7 +9		11 = 10 / 4	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintah daerah		24.492.110. 485		10.540.872. 709	100	10,691,722, 078	100	9.894.873. 591	92.55%	100	10.529.265. 705	100	20.351.104 .117		83.09%
Perencanaan,penganggaran,dan Evaluasi kinerja perangkat daerah	Persentase penyelesaian Dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja secara tepat waktu	100	960,980,160		196.118.400	100	88,119,050	100	83,320,750	94.55%	100	97,564,360	100	377,003,510		39.23%
penyusunan dokumen Perencanaan Prangkat Daerah	Jumlah dokumen Rensra dan Renja serta perubahan Renstra dan Renja yang di susun	12	115,009,370	3	23,471,300	3	26,380,050	3	24,453,550	92.70%	3	62,770,360		110,695,210		96.25%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun	16	251,192,620	4	51,263,800	4	225,000			0.00%	4	12,167,000	4	63,430,800		25.25%

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen perubahan RKA SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD yang di susun	16	329,462,770	4	67,237,300	4	6,554,000	4	4,079,200	62.24%	4	4,043,000	4	75,359,500		22.87%
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun											6,803,000		6,803,000		#DIV/0!
Koordinasi dan Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan yang disusun											3,794,000		3,794,000		#DIV/0!
Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Dokumen evaluasi Kinerja PD yang di susun	16	265,315,400	4	54,146,000	4	54,960,000	4	54,788,000	99.69%	4	3,694,000	4	112,628,000		42.45%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian dokumen administrasin keuangan secara tepat waktu	15	8,459,764,383		6,255,359,493	100	6,005,497,357	100	5,615,704,442	93.51%	100	6,456,426,875	100	18,327,490,810		216.64%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang di sediakan gaji tunjangan sesuai ketentuan	2683	7,414,610,293	29	6,214,610,293	29	5,775,061,157		5,390,795,492	93.35%		6,198,216,375		17,803,622,160		240.12%
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen yang di verifikasi	1	912,318,000		-		216,920,000		212,560,000	97.99%		227,830,200		440,390,200		48.27%
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Laporan Pelaksanaan Akuntansi SKPD											6,007,700		6,007,700		#DIV/0!

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang di susun	1	96,366,340		19,666,600	1	7,116,200		5,980,950	84.05%		12,963,700		38,611,250		40.07%
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Bahan Tanggapan Pemeriksaan yang Di kelola dan disiapkan											3,509,700		3,509,700		#DIV/0!
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan bulanan/Semesteran yang disusun	14	36,469,750		21,082,600	1	6,400,000		6,368,000	99.50%		4,589,500		32,040,100		87.85%
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Laporan Prognosis Realisasi Anggaran Yang Disusun											3,309,700		3,309,700		#DIV/0!
<i>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</i>	Cakupan penyelenggaraan administrasi barang milik daerah pada SKPD		12,000,000		-		12,000,000		11,300,000	94.17%		21,146,600	100	32,446,600		270.39%
Rekonsiliasi dan Pemnyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan Rekonsiliasi BMD yang disusun				-							6,604,800		6,604,800		#DIV/0!
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan Pelaksanaan penatausahaan Barang Milik Daerah	1	12,000,000		-		12,000,000		11,300,000	94.17%		14,541,800		25,841,800		215.35%
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Cakupan penyelenggaraan adminstrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah	100	1,528,960 ,200		-		58,492,350		57,287,902	97.94%	100	541,595,914	100	64,222,000		4.20%

Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Dokumen perencanaan pengelolaan retribusi daerah						2,600,000		2,534,400	97.48%		538,659,214		541,193,614		#DIV/0!
Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen yang disusun		900,000,000		-									-		0.00%
Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Dokumen Obyek Retribusi Daerah yang dimutakhirkan		25,500,000		-									-		0.00%
Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan Pengelola Retribusi Daerah		240,380,100		-							2,936,700		2,936,700		1.22%
Analisa dan pengembangan Pajak Daerah ,serta penyusunan kebijakan pajak daerah	Jumlah Dokumen yang disusun													-		#DIV/0!
Penyuluhan dan Penyeberluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Kegiatan/Jenis kegiatan yang dilakukan dalam rangka penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan retribusi daerah						990,000		990,000	100.00 %				990,000		#DIV/0!
Pendataan dan pendaftran objek retribusi daerah	dokumen objek retribusi daerah yang di mutakhirkan		25,500,000				8,500,000		8,275,000	97.35%				8,275,000		32.45%

Pengolahan data retribusi daerah	Jumlah data retribusi daerah yang diolah		97,200,000				24,000,000		24,000,000	100.00 %				24,000,000		24.69%
Pelaporan pengelolaan retribusi daerah	laporan pengelolaan retribusi daerah		240,380,100				22,402,350		21,488,502	95.92%				21,488,502		8.94%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN dengan predikat kinerja baik	100	280,339,780		57,212,200	100	35,829,000	100	34,583,460	96.52%	100	12,842,500	100	42,095,400		15.02%
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang di fasilitasi mengikuti pendidkan dan pelatihan formal						17,000,000		17,000,000	100.00 %		-		17,000,000		#DIV/0!
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis	50	280,339,780	10	57,212,200	10	18,829,000		17,583,460	93.38%		12,842,500		25,095,400		8.95%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran	100	3,150,651 ,264		745,756,650	100	862,276,190	100	806,190,112	93.50%	100	491,829,800	100	2,043,776,562		64.87%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis komponen instalasi listrik /penerangan bagunan kantor yang di sediakan	15	40,018,000	15	10,004,500	10	9,236,700		9,131,700	98.86%		3,555,400		22,691,600		56.70%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan rumah tangga kantor yang di sediakan		476,400,000		119,100,000		175,750,000		166,662,250	94.83%		57,930,000		343,692,250		72.14%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis bahan logistik kantor yang disediakan	50	124,088,822		25,324,250	10	30,061,250		28,738,850	95.60%		33,779,250		87,842,350		70.79%
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan pengandaan yang di sediakan	560	816,534,800		204,133,700	112						134,430,000		338,563,700		41.46%

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jenis Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundangan yang disediakan	715	173,612,950		69,400,000	143	74,400,000		72,830,000	97.89%		56,400,000		198,630,000		114.41%
Penyediaan Bahan/Material	Penyediaan Bahan / Material Kebutuhan Kantor yang di sediakan	128	97,310,600		24,327,650		69,754,240		68,642,600	98.41%		23,531,150		116,501,400		119.72%
Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah jenis jamuan makan dan minum yang di sediakan	12	68,000,000		17,000,000	-	15,000,000		12,969,000	86.46%		17,000,000		46,969,000		69.07%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Perjalanan Dinas yang di sediakan	20	1,354,686,092		276,466,550	4	488,074,000		447,215,712	91.63%		165,204,000		888,886,262		65.62%
<i>Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	Cakupan Penyelenggara Penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan jasa	%	9,475,407,498		3,155,424,166	100	3,199,187,042	100	2,870,761,389	89.73%	100	2,800,631,256	100	8,826,816,811		93.16%
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang di sediakan jasa	75	70,035,000	14	20,300,000	17	16,800,000		16,800,000	100.00 %		16,800,000		53,900,000		76.96%
Penyediaan Jasa komunikasi ,Sumber Daya Air Dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan biaya tagihan telepon,air dan listrik	70	7,876,536,498	13	2,625,512,166	16	2,963,761,042		2,647,098,389	89.32%		2,598,831,256		7,871,441,811		99.94%
Penyediaan Jasa Pelaratan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor						16,646,000		15,503,000	93.13%		6,200,000		21,703,000		#DIV/0!
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor	100	1,528,836,000		509,612,000	100	201,980,000		191,360,000	94.74%		178,800,000		879,772,000		57.55%

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara	%	624,007,200		131,001,800	100	430,321,089	100	415,725,536	96.61%	100	128,375,000	100	675,102,336		108.19%
Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah mobil jabatan yang di lakukan pemeliharaan rutin/ berkala	40	444,007,200		111,001,800							128,375,000		239,376,800		53.91%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah mobil jabatan yang di lakukan pemeliharaan rutin/ berkala						140,375,500		130,154,861	92.72%				130,154,861		#DIV/0!
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Luas bangunan Gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan		40,000,000				40,000,000		39,008,500	97.52%				39,008,500		97.52%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainya yang di peliharah/di rehabilitasi		140,000,000		20,000,000		249,945,589		246,562,175	98.65%				266,562,175		190.40%
PROGRAM PENGELOLAH PENDAPATAN DAERAH	Persentase Realisasi Pajak Dearah Terhadap Target yang ditetapkan	100	15,649,057,759		3,098,329,855	100	4,006,548,399	100	3,731,152,040	93.13%	100		100	9,248,788,670		59.10%
Kegiatan Pengelola pendapatan Daerah		100	15,649,057,759		3,098,329,855	100	4,006,548,399	100	3,731,152,040	93.13%	100	2,419,306,775	100	9,248,788,670		59.10%

Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	133	401,820,000		-						26,051,500		26,051,500		6.48%	
Analisa dan pengembangan Pajak Daerah ,serta penyusunan kebijakan pajak daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	300	450,000,000			100	207,260,000		180,647,654	87.16%		102,113,400		282,761,054		62.84%
Penyuluhan dan Penyeberluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah											65,984,450		65,984,450		#DIV/0!
Penyediaan sarana dan Prasaran Pengelolah Pajak Daerah	Jumlah wajib pajak dan Retribusi yang di layani	2000	132,490,400		33,122,600	2000	16,850,000		13,200,000	78.34%		19,100,000		65,422,600		49.38%
Pendataan dan pendaftaran objek Pajak Daerah	Terlaksananya Pendataan dan Pendaftaran	145	589,501,080		147,375,270	29	139,451,100		138,782,550	99.52%		599,033,250		885,191,070		150.16%
Pengelola, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah basis data pajak daerah dan retribusi	11	1,795,240,200		448,810,050	3	120,000,000		118,960,000	99.13%		100,458,150		668,228,200		37.22%
Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkantoran (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB	Terlaksananya Penilaian pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan		4,622,557,500		962,557,500		1,591,139,450		1,564,089,550	98.30%		511,848,000		3,038,495,050		65.73%
Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah		504,000,000		-		163,500,000		163,500,000	100.00 %		53,286,100		216,786,100		43.01%
Pelayaan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah wajib pajak dan Retribusi yang di layani		923,416,800		230,854,200		98,918,470		98,085,500	99.16%		74,184,750		403,124,450		43.66%

Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data pelaporan Pajak Daerah yang telah dilakukan Penelitian dan Verifikasi		33,637,500		-		9,750,000		9,672,300	99.20%		33,686,600		43,358,900		128.90%
Penagihan Pajak Daerah	Terlaksananya Penagihan Pajak daerah		2,324,428,240		572,257,090		425,004,100		405,468,425	95.40%		351,323,150		1,329,048,665		57.18%
Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah											2,660,400		2,660,400		#DIV/0!
Pengendalian, pemeriksaan, dan pengawasan pajak daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah		1,058,553,459				563,376,295		476,433,013	84.57%		357,605,075		834,038,088		78.79%
Pembinaan Dan Pengawasan Pengelolah Pajak Daerah dan Retribusi daerah	Laporan hasil monitoring dan evaluasi		2,813,412,580		703,353,145		671,298,984		562,313,048	83.76%		84,669,800		1,350,335,993		48.00%
Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah											37,302,150		37,302,150		

Tabel 2. 1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah

Secara umum pelaksanaan program dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2022 terlaksana dengan baik sebagaimana yang direncanakan. Sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2022, total belanja Badan Pendapatan Daerah Kab. Luwu sebesar **Rp. 14.428,270.477,00**

Realisasi Belanja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2022 adalah sebesar **Rp. 13.668.635.604,00,-** atau mencapai **94,74 %** dari anggaran Belanja Tahun 2021 yaitu sebesar Rp 13.657.5302.114,-.

Adapun realisasi program dan kegiatan yang dilaksanakan tahun 2022 dapat diuraikan sebagai berikut :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten / Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten / Kota, alokasi anggaran sebesar Rp, 10.691.772.078,- dan terealisasi sebesar Rp. 9.894.873.591,-

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, alokasi anggaran sebesar Rp. 88.119.050,- dan terealisasi sebesar Rp. 83.320.750,- atau sebesar 94,55 %
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, alokasi anggaran sebesar Rp. 6.005.497.357,00,- dan terealisasi sebesar Rp. 5.615.704,00- atau sebesar 93.50 %
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, alokasi anggaran sebesar Rp. 12.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 11.300.000,- atau sebesar 94.16 %
4. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah, alokasi anggaran sebesar Rp. 58.492.350,- dan terealisasi sebesar Rp. 57.287.902,- atau sebesar 98,22%
5. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, alokasi anggaran sebesar Rp. 35.829.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 34.583.460,- atau sebesar 96.52 %
6. Administrasi Umum Perangkat Daerah, alokasi anggaran sebesar Rp. 862.276.190,- dan terealisasi sebesar Rp. 806.190.112,- atau sebesar 93.49 %.

7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, alokasi anggaran sebesar Rp. 2.929.187.042,- dan terealisasi sebesar Rp. 2.870.761.389,- atau sebesar 93.49 %.
8. Pemeliharaan Barang Milim Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, alokasi anggaran sebesar Rp. 430.321.089,- dan terealisasi sebesar Rp. 415.725.536,- atau sebesar 96.60 %.

B. PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

1. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah, alokasi anggaran sebesar Rp. 4.006.546.399,- dan terealisasi sebesar Rp. 3.731.152.040,- atau sebesar 93.12 %

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya didukung oleh Sumber Daya Manusia dengan latar belakang pendidikan dan keterampilan yang cukup memadai, juga didukung dengan sarana dan prasarana guna menunjang kegiatan organisasi, sehingga memungkinkan pencapaian kinerja yang memuaskan.

Pada pembahasan sub bab ini perlu disajikan tabel analisis pencapaian kinerja perangkat daerah, yang disesuaikan menurut perangkat daerah masing-masing, dengan format tabel T-C.30.

Tabel T-C.30

**Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Luwu**

No .	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Rasio Realisasi PAD terhadap target PAD		IKU	-	98,20%	98,20%	90%	9,7%	98,20%	98,20%	-	
2	Persentase Peningkatan PAD		IKU	-	97,36%	97,36%	90%	5%	97,36%	97,36%	-	
3	Persentase PAD Terhadap Pendapatan daerah		IKU	-	3.80%	15,45%	90%	7,70%	980%	15,45%	-	

Tabel 2. 2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu

Capaian Sasaran Strategis Tahun 2021 – 2022
RASIO PENINGKATAN DAN PENDAPATAN TA, 2021 S/D 2022

1. RASIO PENINGKATAN PENDAPATAN : Realisasi Pendapatan 2022 – Realisasi Pendapatan 2021

$$\begin{aligned} & \text{Realiasi Pendapatan 2021} \\ &= \frac{1.476.102.745.149,56 - 1.404.537.109.394.18}{1.404.537.109.394.18} \\ &= \frac{71.565.635.755.38}{1.404.537.109.394.18} \\ &= 0,05 \end{aligned}$$

2. PERSENTASE PENINGKATAN PAD : Realisasi PAD 2022 – Realisasi Pendapatan 2021 x 100

$$\begin{aligned} & \text{Realisasi PAD 2021} \\ &= \frac{163.816.263.663,56 - 132.465.563.071,8}{132.465.563.071,8} \times 100 \\ &= \frac{31.350.700.591.76}{132.465.563.071,8} \\ &= 23.67 \% \end{aligned}$$

3. PERSENTASE PAD TERHADAP PENDAPATAN : = Realisasi PAD x 100%
Realisasi Pendapatan Daerah

$$\begin{aligned} &= \frac{163.816.263.663.56}{1.404.551.484.394,18} \times 100\% \\ &= 11,09 \% \end{aligned}$$

Capaian sasaran strategis pada tahun 2021 sampai dengan 2022 ditandai dengan tercapainya target indikator kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu. Dari 3 indikator yang telah ditetapkan telah terealisasi rata-rata 98 %. Secara umum Badan Pendapatan Daerah telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, hal tersebut terlihat pada hasil Evaluasi Rencana Kerja, Evaluasi Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah dilakukan melalui Pengukuran kinerja dan Program yang terlihat pada tabel berikut

2.3 Isu- isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Tugas dan Fungsi utama Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu adalah Meningkatkan Pendapatan Daerah, dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi tersebut Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu memiliki pegawai yang berjumlah 155 Orang yang terdiri dari Kepala Badan 1 (satu) Orang, Sekretaris 1 (satu) Orang, Kepala Bidang 4 (empat) orang, Kepala Seksi/kepala Sub Bagian 15 Orang, Kepala UPTD 4 Orang, KTU 2 Orang, PLT 2 Orang, Staf sebanyak 40 Orang dan Tenaga Kontrak sebanyak 87 Orang. Badan pendapatan Daerah Kabupaten luwu dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) senantiasa berkoordinasi dengan OPD penghasil PAD lainnya Seperti Dinas Perhubungan, Dinas PU & Penata Ruang, Dinas Perikanan, Dinas Pariwisata, Dinas Kesehatan, Badan Lingkungan Hidup (BLH), Dinas Pertanian, Dinas Perdagangan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Bappeda & Litbang, Sekertariat Daerah, Rumah Sakit Umum Batara Guru.

Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu masih menemukan hambatan-hambatan yang mempengaruhi optimalisasi pencapaian, capaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu, berikut hambatan-hambatan yang dimaksud :

- a. Masih terdapat kinerja pegawai yang kurang optimal dan profesional dalam melaksanakan tugas sehingga hasil pencapaian target kinerja kurang maksimal;
- b. Kurangnya sarana transportasi dan sarana komputer bila dibandingkan dengan volume kegiatan yang harus diselesaikan dengan tepat waktu.
- c. Kurangnya sumber daya manusia dibandingkan dengan jenis dan jumlah tanggung jawab yang harus dilaksanakan terutama untuk mengelola data objek pajak dan pelayanan terhadap wajib pajak.
- d. Masih adanya kecenderungan masyarakat untuk “menghindar” dari kewajiban membayar pajak dan retribusi daerah.

Selain Permasalahan Tersebut diatas juga di temui berbagai hambatan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi seperti :

- a. Regulasi yang sering berubah-ubah
- b. Kurangnya pemahaman Pegawai Tentang Pengelolaan Pendapatan Daerah
- c. Disiplin Pegawai Masih Kurang

Permasalahan dan hambatan yang terdapat pada Badan Pendapatan Daerah tentu saja akan berdampak pada capaian visi dan misi kepada daerah jika tidak segera dibenahi, adapun visi dan misi Kepala Daerah terpilih tahun 2019-2024, serta hubungannya dengan kinerja Badan Pendapatan Daerah dapat terlihat pada uraian berikut :

Visi Bupati dan Wakil Bupati Luwu terpilih yang juga ditetapkan sebagai visi Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 :

**KABUPATEN LUWU, MAJU, SEJAHTERA DAN
MANDIRI DALAM NUANSAL RELIGI**

Dalam rumusan visi ini ada empat pokok visi yakni maju, Sejahtera, Mandiri dan Religi. Penjelasan masing-masing pokok visi adalah sebagai berikut.

Maju, mengandung makna terwujudnya Kabupaten Luwu yang lebih baik dengan meningkatnya sumber daya manusia berkualitas, keadaan sosial ekonomi masyarakat yang stabil, yang ditandai dengan berkurangnya tingkat kemiskinan dan penganggaran serta ditopang oleh transformasi birokrasi secara bertahap.

Sejahtera, mengandung makna suatu keadaan masyarakat Kabupaten Luwu dapat meningkatkan pemenuhan kebutuhan dasarnya yang ditandai dengan peningkatan derajat kesehatan, pemenuhan pendidikan dasar dan peningkatan daya beli dalam kondisi masyarakat yang aman dan tentram.

Mandiri, mengandung makna dengan kemandirian pengelolaan daerah berupa kebijakan pemerintah daerah yang mengutamakan kemampuan daerah dalam rangka mengelola potensi sumber daya alam dan buatan yang didukung oleh kemampuan sumber daya manusia.

Religi, mengandung makna suatu kondisi masyarakat Kabupaten Luwu dapat meningkatkan pemahaman ajaran agama dan pengalaman agamanya dalam tataran kehidupan masyarakat.

Dalam rangka pencapaian visi tersebut telah ditetapkan 10 (sepuluh) misi pembangunan daerah yaitu sebagai berikut :

- a) Mewujudkan pemerintahan yang profesional, berwibawa, amanah, transparan dan akuntabel
- b) Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat.
- c) Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan
- d) Pengembangan ekonomi kerakyatan melalui pengembangan koperasi, usaha mikro kecil menengah dan perluasan lapangan kerja.
- e) Mewujudkan ketahanan pangan dan perekonomian daerah yang tangguh berbasis agribisnis.
- f) Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dalam mewujudkan masyarakat Kabupaten Luwu yang religious.
- g) Optimalisasi otonomi desa dan pemberdayaan masyarakat pedesaan.
- h) Menciptakan iklim investasi dan usaha yang kondusif berwawasan lingkungan dan sistem pengupahan yang berkeadilan.
- i) Penegakan supremasi hukum, hak azasi manusia, untuk mendorong partisipasi public yang dinamis dan kondusif.
- j) Mewujudkan kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup serta penanggulangan bencana.

2.4 Review terhadap rancangan awal RKPD

Rancangan awal rencana kerja perangkat daerah tahun 2024 dengan hasil analisis kebutuhan terdapat beberapa program dan kegiatan yang mengalami kenaikan pagu dan rancangan awal RKPD, hal tersebut disebabkan beberapa faktor diantaranya masih minimnya anggaran tiap kegiatan dan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung yang berimbas pada pelayanan dan kegiatan yang akan dilaksanakan tidak berjalan maksimal sesuai yang direncanakan. Adapun program dan kegiatan tersebut sudah sesuai namun besaran pagu terjadi peningkatan pagu yang nantinya yang akan dipilah sesuai dengan skala prioritas dengan tiap bidang dalam mengelola program yang akan dijabarkan dan dilaksanankan.

Alasan Proses dilakukan karena tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah

yang semakin kompleks yang dengan sendirinya menuntut kinerja dan pelayanan maksimal sehingga rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan mengalami peningkatan dari rancangan pagu sebelumnya:

T-C.31.

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024

Kabupaten Luwu

Tabel 2. 3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Kabupaten Luwu

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATA N/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUBK EGIATAN	TARGET INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUBK EGIATAN	RENCANA AWAL RKPD 2024				ANALISIS KEBUTUHAN RENJA 2024			
								LOKA SI	TARGET CAPAIA N KINERJA	PAGU INDIKATIF	SUMB ER DANA	LOKA SI	TARGET CAPAIA N KINERJA	PAGU INDIKATIF	SUMB ER DANA
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		0			12,969,719,080				12,658,677,130	
5	2				KEUANGAN (BADAN PENDAPATAN DAERAH)					12,969,719,080				12,658,677,130	
5	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah			10,828,386,180				10,515,302,842	
5	2	1	2.0 1		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Cakupan ketersediaan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja		100%	97,564,360	PAD		100%	114,188,714	PAD
5	2	1	2.0 1	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Belop a	Dokumen	62,770,360	PAD	Belop a	Dokumen	67,697,182	PAD
5	2	1	2.0 1	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA- SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan RKA-SKPD	Belop a	Dokumen	12,167,000	PAD	Belop a	Dokumen	7,504,332	PAD

5	2	1	2.0 1	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Perubahan RKA-SKPD	Belop a	Dokumen	4,043,000	PAD	Belop a	Dokumen	6,469,554	PAD
5	2	1	2.0 1	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan DPA-SKPD	Belop a	Dokumen	6,803,000	PAD	Belop a	Dokumen	6,818,690	PAD
5	2	1	2.0 1	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Belop a	Dokumen	4,293,000	PAD	Belop a	Dokumen	4,292,627	PAD
5	2	1	2.0 1	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Belop a	Laporan	3,794,000	PAD	Belop a	Laporan	4,959,733	PAD
5	2	1	2.0 1	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Belop a	Laporan	3,694,000	PAD	Belop a	Laporan	16,446,596	PAD
5	2	1	2.0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase penyelesaian dokumen administrasi keuangan secara tepat waktu		100%	6,705,900,750	DAU		100%	6,458,513,885	DAU
5	2	1	2.0 2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Menerima Gaji dan Tunjangan	Belop a	Orang/Bu lan	6,447,690,250	DAU	Belop a	Orang/Bu lan	6,198,216,375	DAU
5	2	1	2.0 2	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Belop a	Dokumen		PAD	Belop a	Dokumen		PAD

5	2	1	2.0 2	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Belop a	Dokumen	227,830,200	PAD	Belop a	Dokumen	228,964,157	PAD
5	2	1	2.0 2	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Belop a	Dokumen	6,007,700	PAD	Belop a	Dokumen	6,169,871	PAD
5	2	1	2.0 2	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Belop a	Laporan	12,963,700	PAD	Belop a	Laporan	13,668,119	PAD
5	2	1	2.0 2	6	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Belop a	Dokumen	3,509,700	PAD	Belop a	Dokumen	3,510,937	PAD
5	2	1	2.0 2	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Belop a	Laporan	4,589,500	PAD	Belop a	Laporan	4,667,598	PAD
5	2	1	2.0 2	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Belop a	Dokumen	3,309,700	PAD	Belop a	Dokumen	3,316,828	PAD
5	2	1	2.0 3		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Cakupan penyelenggaraan administrasi barang milik daerah pada SKPD		80%	21,146,600	PAD		80%	23,666,321	
5	2	1	2.0 3	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Belop a	Dokumen		PAD	Belop a	Dokumen		
5	2	1	2.0 3	2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Belop a	Dokumen			Belop a	Dokumen		
5	2	1	2.0 3	3	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	Belop a	Laporan			Belop a	Laporan		
5	2	1	2.0 3	4	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Belop a	Laporan			Belop a	Laporan		

5	2	1	2.0 3	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Belop a	Laporan	6,604,800	PAD	Belop a	Laporan	6,603,724	PAD
5	2	1	2.0 3	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Belop a	Laporan	14,541,800	PAD	Belop a	Laporan	17,062,597	PAD
5	2	1	2.0 3	7	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksananya Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Belop a	Dokumen			Belop a	Dokumen		
5	2	1	2.0 4		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan					541,595,914	PAD			537,129,106	
5	2	1	2.0 4	1	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Tersedianya Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	Belop a	Dokumen	538,659,214	PAD	Belop a	Dokumen	534,220,460	PAD
5	2	1	2.0 4	2	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Tersedianya Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah, dan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah, dan Kebijakan Retribusi Daerah	Belop a	Dokumen			Belop a	Dokumen		
5	2	1	2.0 4	3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Terlaksananya Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Belop a	Laporan			Belop a	Laporan		
5	2	1	2.0 4	4	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah (Sub Kegiatan berlaku untuk karakter retribusi yang membutuhkan Pendataan dan Pendaftaran)	Tersedianya Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	Belop a	Dokumen			Belop a	Dokumen		
5	2	1	2.0 4	5	Pengolahan Data Retribusi Daerah (Sub Kegiatan berlaku untuk karakter retribusi yang membutuhkan Pendataan dan Pendaftaran)	Terlaksananya Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	Belop a	Laporan			Belop a	Laporan		
5	2	1	2.0 4	6	Penetapan Wajib Retribusi Daerah			Belop a	Dokumen			Belop a	Dokumen		

					(Sub Kegiatan berlaku untuk karakter retribusi yang membutuhkan Pendataan dan Pendaftaran)	Tersedianya Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah	Belop a								
5	2	1	2.0 4	7	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Belop a	Laporan	2,936,700	PAD	Belop a	Laporan	2,908,646	PAD	
5	2	1	2.0 5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase ASN dengan predikat kinerja baik berdasarkan hasil penilaian Perjanjian Kinerja		100%	35,042,500	PAD		100%	37,307,000	PAD	
5	2	1	2.0 5	1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Belop a	Unit			Belop a	Unit			
5	2	1	2.0 5	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Belop a	Paket			Belop a	Paket			
5	2	1	2.0 5	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Belop a	Dokumen			Belop a	Dokumen			
5	2	1	2.0 5	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Belop a	Dokumen			Belop a	Dokumen			
5	2	1	2.0 5	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Belop a	Dokumen			Belop a	Dokumen			
5	2	1	2.0 5	6	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Terlaksananya Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan	Belop a	Orang			Belop a	Orang			
5	2	1	2.0 5	7	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Terlaksananya Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Belop a	Laporan			Belop a	Laporan			

5	2	1	2.0 5	8	Pemindahan Tugas ASN	Terlaksananya Pemindahan Tugas ASN	Jumlah ASN yang dipindahtugaskan	Belop a	Orang			Belop a	Orang		
5	2	1	2.0 5	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Belop a	Orang	22,200,000	PAD	Belop a	Orang	22,200,000	PAD
5	2	1	2.0 5	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Belop a	Orang			Belop a	Orang		
5	2	1	2.0 5	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Belop a	Orang	12,842,500	PAD	Belop a	Orang	15,107,000	PAD
5	2	1	2.0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Presentase pemenuhan administrasi perkantoran		100%	498,129,800	PAD		100%	438,326,116	
5	2	1	2.0 6	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Belop a	Paket	3,555,400	PAD	Belop a	Paket	3,543,400	PAD
5	2	1	2.0 6	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Belop a	Paket	63,780,000	PAD	Belop a	Paket	1,199,690	PAD
5	2	1	2.0 6	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Belop a	Paket			Belop a	Paket		
5	2	1	2.0 6	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Belop a	Paket	33,779,250	PAD	Belop a	Paket	33,748,500	PAD
5	2	1	2.0 6	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Belop a	Paket	134,430,000	PAD	Belop a	Paket	134,429,000	PAD
5	2	1	2.0 6	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Belop a	Dokumen	56,400,000	PAD	Belop a	Dokumen	56,400,000	PAD
5	2	1	2.0 6	7	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Belop a	Paket	23,531,150	PAD	Belop a	Paket	26,387,526	PAD

5	2	1	2.0 6	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Belop a	Laporan	17,000,000		Belop a	Laporan	17,050,000	
5	2	1	2.0 6	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Belop a	Laporan	165,654,000	PAD	Belop a	Laporan	165,568,000	PAD
5	2	1	2.0 6	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Belop a	Dokumen			Belop a	Dokumen		
5	2	1	2.0 6	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Belop a	Dokumen			Belop a	Dokumen		
5	2	1	2.0 7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		cakupan penyelenggaraan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		90%		PAD		90%	-	
5	2	1	2.0 7	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Belop a	Unit			Belop a	Unit		
5	2	1	2.0 7	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Belop a	Unit			Belop a	Unit		
5	2	1	2.0 7	3	Pengadaan Alat Besar	Tersedianya Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	Belop a	Unit			Belop a	Unit		
5	2	1	2.0 7	4	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Tersedianya Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan	Belop a	Unit			Belop a	Unit		
5	2	1	2.0 7	5	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Belop a	Unit			Belop a	Unit		
5	2	1	2.0 7	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Belop a	Unit			Belop a	Unit		
5	2	1	2.0 7	7	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Tersedianya Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Belop a	Unit			Belop a	Unit		
5	2	1	2.0 7	8	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Tersedianya Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Belop a	Unit			Belop a	Unit		

5	2	1	2.0 7	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Belop a	Unit			Belop a	Unit		
5	2	1	2.0 7	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Belop a	Unit			Belop a	Unit		
5	2	1	2.0 7	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Belop a	Unit			Belop a	Unit		
5	2	1	2.0 8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		cakupan penyelenggara penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan jasa		100%	2,800,631,256	PAD		100%	2,777,770,800	PAD
5	2	1	2.0 8	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang diregistrasi, serta Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Belop a	400 Surat	16,800,000	PAD	Belop a	400 Surat	16,800,000	PAD
5	2	1	2.0 8	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Belop a	Laporan	2,598,831,256	PAD	Belop a	Laporan	2,575,320,800	PAD
5	2	1	2.0 8	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Belop a	Laporan	6,200,000	PAD	Belop a	Laporan	6,850,000	PAD
5	2	1	2.0 8	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Belop a	Laporan	178,800,000	PAD	Belop a	Laporan	178,800,000	PAD
5	2	1	2.0 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					128,375,000	PAD			128,400,900	
5	2	1	2.0 9	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan	Belop a	Unit			Belop a	Unit		

					Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	dibayarkan Pajaknya									
5	2	1	2.0 9	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Belop a	Unit	128,375,000	PAD	Belop a	Unit	128,400,900	PAD	
5	2	1	2.0 9	3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	Belop a	Unit			Belop a	Unit			
5	2	1	2.0 9	4	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Tak Bermotor	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	Belop a	Unit			Belop a	Unit			
5	2	1	2.0 9	5	Pemeliharaan Mebel	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Belop a	Unit			Belop a	Unit			
5	2	1	2.0 9	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Belop a	Unit			Belop a	Unit			
5	2	1	2.0 9	7	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Belop a	Unit			Belop a	Unit			
5	2	1	2.0 9	8	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Belop a	Unit			Belop a	Unit			
5	2	1	2.0 9	9	Pemeliharaan/Rehabili tasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Belop a	3000 M2			Belop a	3000 M2			
5	2	1	2.0 9	10	Pemeliharaan/Rehabili tasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Belop a	Unit			Belop a	Unit			
5	2	1	2.0 9	11	Pemeliharaan/Rehabili tasi Sarana dan Prasarana Pendukung	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung	Belop a	Unit			Belop a	Unit			

						Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi										
5	2	1	2.0 9	1 2		Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi	Belop a	Ha			Belop a	Ha				
5	2	4				PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH						2,141,332,900	PAD				2,143,374,288	PAD
5	2	4	2.0 1			Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah						2,141,332,900	PAD				2,143,374,288	PAD
5	2	4	2.0 1	1		Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Tersedianya Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Belop a	Dokumen	26,051,500		PAD	Belop a	Dokumen	26,015,575		PAD
5	2	4	2.0 1	2		Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Tersedianya Hasil Analisis Pajak Daerah serta Terlaksananya Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah Serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Belop a	Dokumen	102,113,400		PAD	Belop a	Dokumen	108,810,013		PAD
5	2	4	2.0 1	3		Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Terlaksananya Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Belop a	Laporan	65,984,450		PAD	Belop a	Laporan	66,324,916		PAD
5	2	4	2.0 1	4		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Belop a	Unit	19,100,000		PAD	Belop a	Unit	19,150,000		PAD
5	2	4	2.0 1	5		Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Tersedianya Data Objek Pajak, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak Daerah dan Wajib Pajak Daerah	Belop a	Laporan	599,033,250		PAD	Belop a	Laporan	327,830,819		PAD
5	2	4	2.0 1	6		Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Pajak Daerah	Terlaksananya Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan basis Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Belop a	Laporan	100,458,150		PAD	Belop a	Laporan	103,118,992		PAD
5	2	4	2.0 1	7		Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas tanah dan Bangunan	Terpenuhinya Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	Belop a	Objek Pajak	511,848,000		PAD	Belop a	Objek Pajak	511,801,744		PAD
5	2	4	2.0 1	8		Penetapan Wajib Pajak Daerah	Tersedianya Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Belop a	Dokumen	53,286,100		PAD	Belop a	Dokumen	53,250,025		PAD

5	2	4	2.0 1	9	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Tersedianya Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Belop a	Layanan	45,684,750	PAD	Belop a	Layanan	46,377,777	PAD
5	2	4	2.0 1	0	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Terlaksananya Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang telah dilakukan Penelitian dan Verifikasi	Belop a	Dokumen	33,686,600	PAD	Belop a	Dokumen	36,296,062	PAD
5	2	4	2.0 1	1	Penagihan Pajak Daerah	Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Belop a	Dokumen	351,323,150	PAD	Belop a	Dokumen	355,370,657	PAD
5	2	4	2.0 1	2	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Terlaksananya Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Belop a	Dokumen	2,660,400	PAD	Belop a	Dokumen	2,620,885	PAD
5	2	4	2.0 1	3	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Terlaksananya Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Belop a	Dokumen	108,131,200	PAD	Belop a	Dokumen	357,709,883	PAD
5	2	4	2.0 1	4	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Belop a	Laporan	84,669,800	PAD	Belop a	Laporan	91,395,575	PAD
5	2	4	2.0 1	5	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Terlaksananya Upaya Mengubah Transaksi Tunai menjadi Non Tunai	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Belop a	Laporan	37,302,150	PAD	Belop a	Laporan	37,301,365	PAD

2.5 Penelaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berdasarkan pada misi Bupati dan Wakil Bupati, maka Badan Pendapatan Daerah akan mendukung sepenuhnya pelaksanaan misi pertama yaitu **mewujudkan pemerintahan yang profesional, berwibawa, amanah, transparan dan akuntabel**. Dalam pencapaian visi dan misi Bupati serta Wakil Bupati Terpilih terdapat beberapa tantangan dan peluang yang harus diperhatikan guna pencapaian kinerja yang optimal, adapun tantangan dan peluang pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu yaitu:

a. Tantangan

1. Perkembangan teknologi yang berbasis teknologi informasi yang cepat dalam pengelolaan keuangan;
2. Adanya tuntutan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel;
3. Perubahan regulasi yang berubah dengan dinamis dan cepat;
4. Implementasi akuntansi berbasis akrual;
5. Semakin ketatnya pengawasan terhadap aktivitas Pemerintah Daerah khususnya Pendapatan Daerah;

b. Peluang

1. Adanya Lembaga Pemerintahan dan Swasta yang mendukung upaya peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM;
2. Hubungan kerja dengan Instansi terkait dan Stakeholder telah terjalin dengan baik;
3. Adanya berbagai Peraturan Perundang-Undangan yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi;
4. Adanya dukungan dari Pimpinan Eksekutif maupun Legislatif;
5. Adanya dukungan anggaran secara teratur dan berkesinambungan;

Selain tantangan dan peluang yang perlu diperhatikan dalam pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih juga terdapat isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis yang menjadi acuan dalam perumusan program dan kegiatan yang lasim disebut isu strategis. Adapun isu-isu strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu adalah :

1. Laju Inflasi yang mempengaruhi fiscal daerah
2. Ketergantungan terhadap pembiayaan dari pusat masih sangat tinggi;
3. Ketersediaan sumber daya keuangan daerah yang terbatas;

4. Pengguna Barang Kabupaten Luwu belum sepenuhnya disiplin dalam penatausahaan aset sesuai ketentuan;
5. Tuntutan masyarakat untuk melakukan pelayanan prima.

c. Tugas Fungsi, dan Struktur Organisasi Bapenda

Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

▪ **Tugas Pokok Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu.**

Bapenda memiliki tugas pokok yaitu membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan sub bidang pendapatan daerah yang menjadi kewenangan daerah. Bapenda turut berperan serta dalam merumuskan kebijakan perencanaan operasional program organisasi pengelolaan pendapatan daerah melalui Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Dana Perimbangan melalui Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Bagi Hasil Pajak Daerah, dan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi serta pelaksanaan Penatausahaan akuntansi dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran Pendapatan sesuai dengan sistem akuntansi keuangan daerah berdasarkan standar akuntansi pemerintahan dan menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP) di Lingkungan BAPENDA yang searah dengan kebijakan umum daerah dan norma, standar, prosedur, kriteria serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

▪ **Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu.**

Badan Pendapatan Daerah Mempunyai Fungsi antara lain :

1. Penyusunan rancangan dan pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah;
2. Penyusunan Kebijakan pelaksanaan pemungutan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan;
3. Pelaksanaan pendaftaran, pendataan, penetapan, dan penagihan serta penggalian potensi Pajak Daerah;
4. Pelaksanaan pembukuan, pelaporan hasil pungutan dan penerimaan pendapatan daerah;
5. Pelaksanaan perencanaan, pengawasan dan pengendalian operasional dibidang pendaftaran, pendataan, penetapan dan penagihan serta penggalian potensi pendapatan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

6. Pelaksanaan pelayanan pendaftaran, pendataan, penetapan dan penagihan serta penggalian potensi pajak daerah dan pendapatan lain-lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Pelaksanaan penyuluhan dan menerima pengaduan mengenai pendapatan daerah;
8. Pelaporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dan fungsi;
9. Pelaksanaan tugas lainnya yang di berikan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Prioritas Pembangunan Daerah dalam Lima Tahun kedepan harus merujuk pada Visi Pembangunan Pemerintahan Pusat yang baru. Agenda pembangunan tersebut harus menjadi acuan bagi seluruh lingkup Pemerintah Pusat maupun Daerah, Adapun 5 visi Pembangunan Pemerintah Indonesia 2019-2024 adalah :

1. Pembangunan Infrastruktur
2. Pembangunan SDM
3. Mengundang Investasi
4. Mereformasi Birokrasi
5. Menjamin penggunaan APBD yang fokus dan tepat sasaran.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan Merupakan Target-target yang bersifat kuantitatif dari suatu organisasi dan pencapaian target-target ini merupakan ukuran keberhasilan kinerja suatu organisasi. Berdasarkan hal yang berpangkal kepada visi, misi yang telah digariskan, maka Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu menetapkan tujuan dan sasaran sebagai berikut :

Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

No	Tujuan	Sasaran
1	Meningkatkan Pendapatan Daerah	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah
2	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Meningkatkan Pendapatan Daerah
3	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Meningkatkan Kesadaran dan Kepatuhan serta Kepatutan Masyarakat Membayar Pajak

Tabel 3. 1 Tujuan dan sasaran renja perangkat daerah

3.3 Program dan Kegiatan

Faktor Utama yang Menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan Program dan Kegiatan Badan Pendapatan Daerah adalah pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih. Berdasarkan hal tersebut diatas serta mengacu pada peraturan menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri No 21 tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah Maka Disusunlah 2 Program yang membawahi 7 Kegiatan Untuk Tahun Anggaran 2023 dengan Uraian Sebagai Berikut :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - c) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - d) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
 - e) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
 - f) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - g) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - c) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - d) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
 - e) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
 - f) Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksa
 - g) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
 - h) Penyusunan Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - a) Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
 - b) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
4. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
 - a) Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah
 - b) Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah
5. Administarsi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - a) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi
 - b) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
6. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a) Penyediaan komponen instalasi Listrik/penerangan bangunan dan kantor
 - b) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

- c) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - d) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - e) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
 - f) Penyediaan Bahan/ Material
 - g) Fasilitas Kunjungan Tamu
 - h) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - c) Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
 - d) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintahan Daerah
- 1. Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas operasional atau lapangan
 - 2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

B. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

- 1. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah
 - a) Perencanaan pengelolaan pajak daerah
 - b) Analisa dan pengembangan pajak daerah, serta penyusunan kebijakan pajak daerah
 - c) Penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah
 - d) Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah
 - e) Pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah
 - f) Pengolahan, pemeliharaan dan pelaporan basis data pajak daerah
 - g) Penilaian pajak bumi dan bangunan edesaan dan perkotaan (PBBP2) serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB)
 - h) Penetapan wajib pajak daerah
 - i) Pelayanan dan konsultasi pajak daerah
 - j) Penelitian dan verifikasi data pelaporan pajak daerah
 - k) Penagihan pajak daerah
 - l) Penyelesaian keberatan pajak daerah
 - m) Pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah
 - n) Pembinaan dan pengawasan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah
 - o) Elektronifikasi Transaksi pemerintah daerah

Adapun total kebutuhan dana/pagu indikatif yang direncanakan untuk tahun 2024 guna pelaksanaan program dan kegiatan adalah sebesar **Rp 12.969.719.080,00 (Dua Belas Milliyar Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Sembilan Belas Ribu Delapan Puluh Rupiah).**

Untuk lebih rincian rencana program dan kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL TC.33
RUMUSAN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN BADAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2024 DAN
PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025
KABUPATEN LUWU

Unit Organisasi : 5.02.5.06.0.00.03.0000
 BADAN PENDAPATAN DAERAH
 Sub Unit Organisasi :
 5.02.5.06.0.00.03.0000 BADAN
 PENDAPATAN DAERAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
					BADAN PENDAPATAN DAERAH				12.658.677.130,00				12.900.043.474,00
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				12.658.677.130,00				12.900.043.474,00
5	02				KEUANGAN				12.658.677.130,00				12.900.043.474,00

5	0	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								10.515.302.842,00					10.824.397.264,00
5	0	0	2.		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								114.188.714,00					105.273.148,00
5	0	0	2.	0	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
						Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun	- Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	3 Dokumen	100 %	67.697.182,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	67.791.988,00
5	0	0	2.	0	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD													
	2	1	0	0														
			1	0														
				2														

						Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun	- Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	4 Dokumen	100 %	7.504.332,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen	13.018.690,00
5	0	0	2.	0	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD													
	2	1	0	0		Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun	- Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	4 Dokumen	100 %	6.469.554,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4 Dokumen	4.326.010,00

5	0	0	2.	0	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD															
2	1	0	0	0		Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun	- Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Dokumen	100 %	6.818.690,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	7.279.210,00		
5	0	0	2.	0	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD															
2	1	0	0	0		Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun	- Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	4 Dokumen	100 %	4.292.627,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	4 Dokumen	4.593.510,00		

								kat daerah yang disusun	Kel/ Desa									
5	02	01	2.001	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD													
						Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun	- Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	100 %	4 Laporan	100 %	4.959.733,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	4.311.160,00

5	0	0	2.	0	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
2	1		0	0		Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun	- Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	4 Laporan	100 %	16.446.596,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	3.952.580,00	
5	0	0	2.		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								6.458.513.885,00					6.718.931.429,00	
2	1		0	0	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
2	1		0	0		Cakupan Ketersediaan Penunjang Urusan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Jenis Dokumen Administrasi Keuangan	- Kab. Luwu, Semua Kecamatan	100 %	2683 Orang/bulan	8 Jenis	6.198.216.375,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2683 Orang/bulan	6.447.690.250,00	

								Perang kat Daerah yang Disusun	n, Sem ua Kel/ Desa									
5	0 2	0 1	2. 0 2	0 0 3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD													
						Cakupan Ketersediaan Penunjang Urusan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaa n dan Pengujian/Veri fikasi Keuangan SKPD	Jumlah Jenis Dokum en Admini strasi Keuang an Perang kat Daerah yang Disusun	- Kab. Luwu , Sem ua Keca mata n, Sem ua Kel/ Desa	100 %	1 Doku men	8 Jeni s	228.964 .157,00	PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD)		Jumlah Dokumen Penatausahaa n dan Pengujian/Veri fikasi Keuangan SKPD	1 Doku men	239.221 .710,00
5	0 2	0 1	2. 0 2	0 0 4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD													
						Cakupan Ketersediaan Penunjang Urusan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Jenis Dokum en Admini strasi Keuang an	- Kab. Luwu , Sem ua Keca mata	100 %	1 Doku men	8 Jeni s	6.169.8 71,00	PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD)		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Doku men	6.428.2 39,00

								Perang kat Daerah yang Disusun	n, Sem ua Kel/ Desa										
5	0 2	0 1	2. 0 2	0 0 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
						Cakupan Ketersediaan Penunjang Urusan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Jenis Dokum en Admini strasi Keuang an Perang kat Daerah yang Disusun	- Kab. Luwu , Sem ua Keca mata n, Sem ua Kel/ Desa	100 %	2 Lapor an	8 Jeni s	13.668. 119,00	PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD)		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Lapor an	13.611. 885,00	
5	0 2	0 1	2. 0 2	0 0 6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan														
						Cakupan Ketersediaan Penunjang Urusan Pelaksanaan Urusan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak	Jumlah Jenis Dokum en Admini strasi Keuang	- Kab. Luwu , Sem ua Keca	100 %	1 Doku men	8 Jeni s	3.510.9 37,00	PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD)		Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak	1 Doku men	3.685.1 85,00	

					Pemerintahan Daerah	Lanjut Pemeriksaan	an Perang kat Daerah yang Disusun	mata n, Sem ua Kel/ Desa							Lanjut Pemeriksaan		
5	0	0	2.	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD												
					Cakupan Ketersediaan Penunjang Urusan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Jenis Dokumen Administrasi Keuangan Perang kat Daerah yang Disusun	- Kab. Luwu , Sem ua Keca mata n, Sem ua Kel/ Desa	100 %	17 Laporan	8 Jeni s	4.667.598,00	PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD)		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	17 Laporan	4.818.975,00
5	0	0	2.	0	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran												

						Cakupan Ketersediaan Penunjang Urusan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Jenis Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Disusun	- Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	4 Dokumen	8 Jenis	3.316.828,00	PEND APATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	4 Dokumen	3.475.185,00
5	0	0	2.			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							23.666.321,00					22.203.930,00
5	0	0	2.	0	0	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD												
						Cakupan Ketersediaan Penunjang Urusan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Jenis Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah yang Disusun	- Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	4 Laporan	7 Jenis	6.603.724,00	PEND APATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	6.935.040,00

5	0	0	2.	0	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD															
	2	1	0	0		Cakupan Ketersediaan Penunjang Urusan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaa n Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Jenis Dokum en Admini strasi Barang Milik Daerah yang Disusun	- Kab. Luwu , Sem ua Keca mata n, Sem ua Kel/ Desa	100 %	2 Lapo ran	7 Jeni s	17.062.597,00	PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD)		Jumlah Laporan Penatausahaa n Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Lapo ran	15.268.890,00		
5	0	0	2.		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah										537.129.106,00					550.722.710,00
	2	1	0	4	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah															
5	0	0	2.	0		Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Jenis Dokum en Admini strasi Pendap atan Daerah Kewen	- Kab. Luwu , Sem ua Keca mata n, Sem	100 %	16 Doku men	7 Jeni s	534.220.460,00	PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD)		Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	16 Doku men	547.639.175,00		
	2	1	0	0																
	4		4	0																
				1																

								angan Perang kat Daerah yang Disusun	ua Kel/ Desa										
5	0 2	0 1	2. 0 4	0 0 0 7	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah														
						Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Jenis Dokum en Admini strasi Pendap atan Daerah Kewen angan Perang kat Daerah yang Disusun	- Kab. Luwu , Sem ua Keca mata n, Sem ua Kel/ Desa	100 %	4 Doku men	7 Jeni s	2.908.6 46,00	PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD)		Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	4 Doku men	3.083.5 35,00	
5	0 2	0 1	2. 0 5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								37.307. 000,00					35.042. 500,00	
5	0 2	0 1	2. 0 5	0 0 0 9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														

						Persentase Realisasi Pajak Daerah terhadap target yang ditetapkan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	jumlah Jenis Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Disusun	- Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Orang	7 Jenis	22.200.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Orang	22.200.000,00
5	0	0	2.	0	0	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan												
						Persentase Realisasi Pajak Daerah terhadap target yang ditetapkan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	jumlah Jenis Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Disusun	- Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	6 Orang	7 Jenis	15.107.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	6 Orang	12.842.500,00
5	0	0	2.			Administrasi Umum Perangkat Daerah							438.326.116,00					457.217.291,00

5	0	0	2.	0	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
	2	1	0	0		Cakupan Ketersediaan Penunjang Urusan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Jenis Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	- Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	10 Paket	10 Jenis	3.543.400,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	3.733.170,00	
5	0	0	2.	0	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
	2	1	0	0		Cakupan Ketersediaan Penunjang Urusan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Jenis Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	- Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	7 Paket	10 Jenis	1.199.690,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	0,00	

5	0	0	2.	0	Penyediaan Bahan Logistik Kantor															
	2	1	0	0		Cakupan Ketersediaan Penunjang Urusan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Jenis Penyelenggaraan Administrasi Umum Perang kat Daerah	- Kab. Luwu , Sem ua Keca mata n, Sem ua Kel/ Desa	100 %	30 Paket	10 Jeni s	33.748.500,00	PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD)		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	30 Paket	35.468.213,00		
5	0	0	2.	0	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan															
	2	1	0	0																
			6	0		Cakupan Ketersediaan Penunjang Urusan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Jenis Penyelenggaraan Administrasi Umum Perang kat Daerah	- Kab. Luwu , Sem ua Keca mata n, Sem ua Kel/ Desa	100 %	5 Paket	10 Jeni s	134.429.000,00	PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD)		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	141.151.500,00		

5	0	0	2.	0	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan															
	2	1	0	0		Cakupan Ketersediaan Penunjang Urusan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Jenis Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	- Kab. Luwu , Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	100 %	12 Dokumen	10 Jenis	56.400.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	59.220.000,00		
5	0	0	2.	0	Penyediaan Bahan/Material															
	2	1	0	0																
			6	0		Cakupan Ketersediaan Penunjang Urusan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Jumlah Jenis Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	- Kab. Luwu , Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	100 %	12 Paket	10 Jenis	26.387.526,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	24.707.708,00		

5	02	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu													
						Cakupan Ketersediaan Penunjang Urusan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Jenis Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	- Kab. Luwu , Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	100 %	30 Laporan	10 Jenis	17.050.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	30 Laporan	19.000.000,00
5	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
						Cakupan Ketersediaan Penunjang Urusan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Jenis Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	- Kab. Luwu , Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	100 %	162 Laporan	10 Jenis	165.568.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	162 Laporan	173.936.700,00

5	0	0	2.		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							2.777.770.800,00					2.800.631.256,00	
5	0	0	2.	0	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
						Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jenis jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan	- Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	12 Laporan	4 Jenis	16.800.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	16.800.000,00
5	0	0	2.	0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
						Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Jenis jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang	- Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Sem	100 %	12 Laporan	4 Jenis	2.575.320.800,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	2.598.831.256,00

								disedia kan	ua Kel/ Desa											
5	0 2	0 1	2. 0 8	0 0 0 3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor															
						Cakupan ketersedian penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Jenis jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disedia kan	- Kab. Luwu , Sem ua Keca mata n, Sem ua Kel/ Desa	100 %	21 Lapor an	4 Jeni s	6.850.0 00,00	PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD)		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	21 Lapor an	6.200.0 00,00		
5	0 2	0 1	2. 0 8	0 0 0 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor															
						Cakupan ketersedian penunjang pelaksanaan urusan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jenis jasa penunjang urusan	- Kab. Luwu , Sem ua	100 %	21 Lapor an	4 Jeni s	178.800 .000,00	PEND APAT AN ASLI DAER		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	21 Lapor an	178.800 .000,00		

						pemerintahan daerah	yang Disediakan	pemerintahan daerah yang disediakan	Kecamatan, Semua Kel/Desa					AH (PAD)		yang Disediakan		
5	0	0	2.			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					128.400.900,00							134.375.000,00
5	0	0	2.	0		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan												
				0		Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara	- Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	20 Unit	10 Unit	128.400.900,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit	134.375.000,00
5	0	0				PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					2.143.374.288,00							2.075.646.210,00
5	0	0	2.			Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					2.143.374.288,00							2.075.646.210,00

5	0	0	2.	0	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah															
2	4		0	0		Persentase Realisasi Pajak Daerah terhadap target yang ditetapkanPer sentase Realisasi Penerimaan Dana Perimbangan terhadap Target yang ditetapkanPer sentase ketercapaian target penerimaan retribusi daerahPersentase realisasi penerimaan PBB dan BPHTB	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Terwujudnya realisasi pengelolaan pendapatan daerah	- Kab. Luwu , Semua Kel/ Desa	98.99 %70.63 %90 %80 %	11 Dokumen	100 %	26.015.575,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	11 Dokumen	27.354.075,00		
5	0	0	2.	0	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah															
2	4		0	0																
			1	0																
			2	0																

						Persentase Realisasi Pajak Daerah terhadap target yang ditetapkan Persentase Realisasi Penerimaan Dana Perimbangan terhadap Target yang ditetapkan Persentase ketercapaian target penerimaan retribusi daerah Persentase realisasi penerimaan PBB dan BPHTB	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Terwujudnya realisasi pengelolaan pendapatan daerah	- Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	98.99 % 70.63 % 90 % 80 %	5 Dokumen	100 %	108.810.013,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	5 Dokumen	107.219.070,00
5	0	0	2.	0	0	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah												
	2	4	0	0	0													
			1	0	3													

						Persentase Realisasi Pajak Daerah terhadap target yang ditetapkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Terwujudnya realisasi pengelolaan pendapatan daerah	- Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	98.99 % 70.63 % 90 % 80 %	1 Laporan	100 %	66.324.916,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	1 Laporan	69.283.672,00
5	0	0	2.	0		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah												
	2	4	0	0														
			1	0														
				4														

					Persentase Realisasi Pajak Daerah terhadap target yang ditetapkan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Terwujudnya realisasi pengelolaan pendapatan daerah	- Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	98.99 % 0.63 % 0 % 0 % 0 %	3 Unit	100 %	19.150.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	3 Unit	20.055.000,00
5	0	0	2.	0	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah												
	2	4	0	0													
			1	0													
				5													

						Persentase Realisasi Pajak Daerah terhadap target yang ditetapkan	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Terwujudnya realisasi pengelolan pendapatan daerah	- Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	98.99 % 70.63 % 90 % 80 %	8 Laporan	100 %	327.830.819,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	8 Laporan	10.500.000,00
5	0	0	2.	0		Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah												
	2	4	0	0														
			1	0														
				6														

						Persentase Realisasi Pajak Daerah terhadap target yang ditetapkan	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Terwujudnya realisasi pengolahan pendapatan daerah	- Kab. Luwu, Sema Kcamatan, Sema Kel/ Desa	98.99 % 70.63 % 90 % 80 %	2 Laporan	100 %	103.118 .992,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	2 Laporan	105.481 .057,00
5	0	0	2.	0	0	0	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)											
	2	4	0	0	1	0												
						7												

					Persentase Realisasi Pajak Daerah terhadap target yang ditetapkan	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	Terwujudnya realisasi pengelolan pendapatan daerah	- Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	98.99%70.63%90%80%	17518 Obyek Pajak	100%	511.801.744,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	17518 Obyek Pajak	537.440.400,00
5	0	0	2.	0	Penetapan Wajib Pajak Daerah												
	2	4	0	0													
			1	0													
				8													

						Persentase Realisasi Pajak Daerah terhadap target yang ditetapkan	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Terwujudnya realisasi pengelolaan pendapatan daerah	- Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	98.99 % 70.63 % 90 % 80 %	11 Dokumen	100 %	53.250.025,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	11 Dokumen	500.950.405,00
5	0	0	2.	0		Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah												
	2	4	0	0														
			1	0														
				9														

						Persentase Realisasi Pajak Daerah terhadap target yang ditetapkan	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Terwujudnya realisasi pengelolaan pendapatan daerah	- Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	98.99 % 70.63 % 90 % 80 %	175180 Layan an	100 %	46.377.777,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	175180 Layan an	47.968.987,00
5	0	0	2.	0		Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah												
	2	4	0	0														
			1	1														
				0														

						Persentase Realisasi Pajak Daerah terhadap target yang ditetapkan	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	Terwujudnya realisasi pengelolan pendapatan daerah	- Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	98.99 % 0.63 % 0.80 %	11 Dokumen	100 %	36.296.062,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	11 Dokumen	35.370.930,00
5	0	0	2.	0	0	Penagihan Pajak Daerah												
	2	4	0	0	1													
			1	1	1													

						Persentase Realisasi Pajak Daerah terhadap target yang ditetapkan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Terwujudnya realisasi pengelolaan pendapatan daerah	- Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	98.99 % 70.63 % 90 % 80 %	11 Dokumen	100 %	355.370 .657,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	11 Dokumen	368.889 .307,00
5	0	0	2.	0		Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah												
	2	4	0	0														
			1	1														
				2														

						Persentase Realisasi Pajak Daerah terhadap target yang ditetapkan	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Terwujudnya realisasi pengelolan pendapatan daerah	- Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	98.99 % 70.63 % 90 % 80 %	2 Dokumen	100 %	2.620.885,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	2 Dokumen	3.000.000,00
5	0	0	2.	0		Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah												
	2	4	0	0														
			1	1														
				3														

					Persentase Realisasi Pajak Daerah terhadap target yang ditetapkan	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Terwujudnya realisasi pengelolan pendapatan daerah	- Kab. Luwu, Semua Kel/Desa	98.99%70.63%90%80%	1 Dokumen	100%	357.709.883,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	1 Dokumen	113.537.760,00
5	0	0	2.	0	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah											
	2	4	0	0												
			1	1												
				4												

						Persentase Realisasi Pajak Daerah terhadap target yang ditetapkan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Terwujudnya realisasi pengelolan pendapatan daerah	- Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	98.99 % 70.63 % 90 % 80 %	1 Laporan	100 %	91.395.575,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Laporan	88.903.290,00
5	0	0	2.	0	0	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah												
	2	4	0	0	1													
			1	1	5													

					Persentase Realisasi Pajak Daerah terhadap target yang ditetapkan	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronik Transaksi Pemerintah Daerah	Terwujudnya realisasi pengeluaran pendapatan daerah	- Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	98.99% 70.63% 90% 80%	1 Laporan	100%	37.301.365,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Perkembangan Elektronik Transaksi Pemerintah Daerah	1 Laporan	39.692.257,00
					Persentase Realisasi Penerimaan Dana Perimbangan terhadap Target yang ditetapkan												
					Persentase ketercapaian target penerimaan retribusi daerah												
					Persentase realisasi penerimaan PBB dan BPHTB												
TOTAL												12.658.677.130,00					12.900.043.474,00

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Rencana Kerja

Rencana Kerja merupakan dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, adapun jumlah Program yang direncanakan untuk tahun 2024 sebanyak 2 Program dengan 7 kegiatan,

Adapun program dan kegiatan yang ada pada Badan Pendapatan Daerah yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Provinsi dengan kegiatan :
 - a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah direncanakan
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - c. Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah
 - d. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
 - e. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - f. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - g. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintah Daerah
 - h. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - i. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan kegiatan :
 - a. Pengelolaan Pendapatan Daerah

Adapun isi kerangka pendanaan memuat rincian kegiatan sebagai berikut

Penyusunan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah tetap mengacu pada tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana tertera pada Bab III Rencana Kerja ini, Badan Pendapatan Daerah juga menetapkan 3 (Tiga) Indikator sasaran dan tujuan beserta targetnya sebagai tolak ukur pencapaian kinerja tahun 2024, sebagai tabel berikut :

TABEL 4.1

Indikator Tujuan/ Sasaran Tahun 2024

N o	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARA N	TARGET KINERJA 2024
1	Meningkatkan Penerimaan Pendapatan Daerah	eningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Rasio Peningkatan Pendapatan	$\frac{\text{Pendapatan}}{\text{Pendapatan}} \times 100 \%$
2	Meningkatkan Penerimaan Pendapatan Daerah	Meningkatnya Pendapatan Daerah	Persentase Peningkatan PAD	$\frac{\text{PAD}}{\text{PAD}} \times 100\%$
			Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah	$\frac{\text{PAD}}{\text{Pendapatan}} \times 100\% +$
			Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah	$\frac{\text{PAD}}{2} \times 100\% /$
3	Meningkatkan Akuntabilitas Kinreja Pemerintah Daerah	Meningkatkan Kesadaran dan Kepatuhan serta Kepatutan masyarakat membayar Pajak	Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah	$\frac{\text{PAD}}{2} \times 100\% +$

Tabel 4. 1 Indikator Tujuan/ Sasaran Tahun 2024

4.2 Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah

Kegiatan Untuk Tahun Anggaran 2024 dengan Uraian Sebagai Berikut :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

- b) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - c) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - d) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
 - e) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
 - f) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - g) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - c) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - d) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
 - e) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
 - f) Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksa
 - g) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
 - h) Penyusunan Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- a) Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
 - b) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
4. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
- a) Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah
 - b) Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah
5. Administarsi Kepegawaian Perangkat Daerah
- a) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi
 - b) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
6. Administrasi Umum Perangkat Daerah
- a) Penyediaan komponen instalasi Listrik/penerangan bangunan dan kantor
 - b) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - c) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - d) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - e) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

- f) Penyediaan Bahan/ Material
- g) Fasilitas Kunjungan Tamu
- h) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - c) Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
 - d) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor
- 8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintahan Daerah
 - a) Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas operasional atau lapangan
 - b) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

B. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

- 1. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah
 - a) Perencanaan pengelolaan pajak daerah
 - b) Analisa dan pengembangan pajak daerah, serta penyusunan kebijakan pajak daerah
 - c) Penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah
 - d) Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah
 - e) Pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah
 - f) Pengolahan, pemeliharaan dan pelaporan basis data pajak daerah
 - g) Penilaian pajak bumi dan bangunan edesaan dan perkotaan (PBBP2) serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB)
 - h) Penetapan wajib pajak daerah
 - i) Pelayanan dan konsultasi pajak daerah
 - j) Penelitian dan verifikasi data pelaporan pajak daerah
 - k) Penagihan pajak daerah
 - l) Penyelesaian keberatan pajak daerah
 - m) Pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah
 - n) Pembinaan dan pengawasan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah
 - o) Elektronifikasi Transaksi pemerintah daerah

Untuk Rincian Belanja Pada setiap sub kegiatan dapat kita lihat pada Tabel 4.2 sebagai berikut:

Tabel 4.2

KODE						URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / BELANJA / URAIAN BELANJA	INDIKATOR KINERJA	SATU AN	VOLU ME	JUMLAH
5	0	0				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				11,015,125, 380
5	0	01	2.0			Perencanaan, Penga ngaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Ketersediaan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah			284,303,56 0
5	0	01	2.0	0		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat daerah Yang Disusun	Dok	3	62,770,360
5	1	02	01	0	002	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor				361,400
5	1	02	01	0	002	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover				137,800
5	0	02	01	0	002	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak				269,360
5	0	02	01	0	002	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Benda Pos				50,000
5	0	02	01	0	002	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Komputer				787,800
5	0	02	01	0	005	Belanja Makan dan Minuman Rapat				4,000,000
5	1	02	02	0	004	Belanja Jasa Konersi Aplikasi/ Sistem Informasi				48,000,000
5	1	02	02	0	007	Belanja Lembur				2,380,000
5	0	02	04	0	000	Belanja Perjalanan Dinas Biasa				6,784,000
5	0	01	2.0	0		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah dokumen RKA- SKPD yang disusun	Dok	2	12,167,000
5	1	02	01	0	002	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor				361,400
5	1	02	01	0	002	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover				137,800
5	0	02	01	0	002	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak				260,000

5	01	02	01	01	0027	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Benda Pos					100,000
5	01	02	01	01	0029	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Komputer					423,800
5	01	02	01	01	0052	Belanja Makan dan Minuman Rapat					1,600,000
5	1	02	02	01	0071	Belanja Lembur					2,500,000
5	01	02	04	01	0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					6,784,000
5	02	01	2.01	03		Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA Perubahan -SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA - SKPD	Dok	2		4,043,000
5	1	02	01	01	0024	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor					361,400
5	1	02	01	01	0025	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover					137,800
5	01	02	01	01	0026	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak					260,000
5	01	02	01	01	0027	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Benda Pos					100,000
5	01	02	01	01	0029	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Komputer					423,800
5	01	02	01	01	0052	Belanja Makan dan Minuman Rapat					800,000
5	1	02	02	01	0071	Belanja Lembur					1,960,000
5	02	01	2.01	04		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD					6,803,000
5	1	02	01	01	0024	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor					361,400
5	1	02	01	01	0025	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover					137,800
5	01	02	01	01	0026	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak					260,000
5	01	02	01	01	0027	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Benda Pos					100,000
5	01	02	01	01	0029	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Komputer					423,800
5	01	02	01	01	0052	Belanja Makan dan Minuman Rapat					1,600,000
5	1	02	02	01	0071	Belanja Lembur					3,920,000
5	02	01	2.01	05		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD					4,293,000
5	1	02	01	01	0024	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan					361,400

						Kantor - Alat Tulis Kantor				
5	1	02	01	01	0025	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover				137,800
5	01	02	01	01	0026	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak				260,000
5	01	02	01	01	0027	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Benda Pos				50,000
5	01	02	01	01	0029	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Komputer				723,800
5	01	02	01	01	0052	Belanja Makan dan Minuman Rapat				800,000
5	1	02	02	01	0071	Belanja Lembur				1,960,000
5	02	01	2.01	06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				190,533,200
5	1	02	01	01	0024	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor				361,400
5	1	02	01	01	0025	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover				137,800
5	01	02	01	01	0026	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak				260,000
5	01	02	01	01	0029	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Komputer				274,800
5	01	02	01	01	0052	Belanja Makan dan Minuman Rapat				800,000
5	1	02	02	01	0071	Belanja Lembur				1,960,000
5	02	01	2.01	07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen evaluasi pelaksana program /kegiatan yang di susun	Dok	4	3,694,000
5	1	02	01	01	0024	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor				361,400
5	1	02	01	01	0025	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover				137,800
5	01	02	01	01	0026	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak				260,000
5	01	02	01	01	0027	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Benda Pos				50,000
5	01	02	01	01	0029	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Komputer				124,800
5	01	02	01	01	0052	Belanja Makan dan Minuman Rapat				800,000

5	1	02	02	01	0071	Belanja Lembur				1,960,000
5	02	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Ketersediaan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan daerah			6,705,900,750
5	02	01	2.02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN Yang Di Sediakan Gaji Dan Tunjangan Sesuai	Dok	3	6,447,690,250
5	02	01	2.02	03		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			227,830,200
5	1	01	03	07	0001	Belanja Honorium Penanggung Jawab Pengelolah Keuangan				185,280,000
5	1	01	03	07	0002	Belanja Honorium pengadaan Barang/Jasa				37,040,000
5	1	02	01	01	0024	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor				418,600
5	1	02	01	01	0025	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover				137,800
5	01	02	01	01	0026	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak				260,000
5	01	02	01	01	0027	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Benda Pos				200,000
5	01	02	01	01	0029	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Komputer				423,800
5	01	02	01	01	0052	Belanja Makan dan Minuman Rapat				1,200,000
5	1	02	02	01	0071	Belanja Lembur				2,870,000
5	02	01	2.02	04		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			6,007,700
5	1	02	01	01	0024	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor				373,100
5	1	02	01	01	0025	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover				137,800
5	01	02	01	01	0026	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak				143,000
5	01	02	01	01	0027	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Benda Pos				100,000
5	01	02	01	01	0029	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Komputer				573,800
5	01	02	01	01	0052	Belanja Makan dan Minuman Rapat				1,600,000
5	1	02	02	01	0071	Belanja Lembur				3,080,000

5	0 2	01	2.0 2	0 5		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			12,963,700
5	1	02	01	0 1	002 4	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor				373,100
5	1	02	01	0 1	002 5	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover				137,800
5	0 1	02	01	0 1	002 6	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak				325,000
5	0 1	02	01	0 1	002 7	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Benda Pos				100,000
5	0 1	02	01	0 1	002 9	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Komputer				423,800
5	0 1	02	01	0 1	005 2	Belanja Makan dan Minuman Rapat				1,600,000
5	1	02	02	0 1	007 1	Belanja Lembur				3,220,000
5	0 1	02	04	0 1	000 1	Belanja Perjalanan Dinas Biasa				6,784,000
5	0 2	01	2.0 2	0 6		Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan			3,509,700
5	1	02	01	0 1	002 4	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor				373,100
5	1	02	01	0 1	002 5	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover				137,800
5	0 1	02	01	0 1	002 6	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak				104,000
5	0 1	02	01	0 1	002 7	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Benda Pos				100,000
5	0 1	02	01	0 1	002 9	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Komputer				274,800
5	1	02	02	0 1	007 1	Belanja Lembur				2,520,000
5	0 2	01	2.0 2	0 7		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Sem esteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Sem esteran SKPD			4,589,500
5	1	02	01	0 1	002 4	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor				367,900
5	1	02	01	0 1	002 5	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover				137,800

5	01	02	01	01	0026	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak				520,000
5	01	02	01	01	0027	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Benda Pos				120,000
5	01	02	01	01	0029	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Komputer				573,800
5	1	02	02	01	0071	Belanja Lembur				2,870,000
5	02	01	2.02	08		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			3,309,700
5	1	02	01	01	0024	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor				373,100
5	1	02	01	01	0025	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover				137,800
5	01	02	01	01	0026	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak				104,000
5	01	02	01	01	0027	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Benda Pos				50,000
5	01	02	01	01	0029	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Komputer				124,800
5	1	02	02	01	0071	Belanja Lembur				2,520,000
5	02	01	2.03			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan penyelenggaraan administrasi barang milik daerah pada SKPD			21,146,600
5	02	01	2.03	05		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksanya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			6,604,800
5	1	02	01	01	0024	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor				369,200
5	1	02	01	01	0025	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover				137,800
5	01	02	01	01	0026	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak				104,000
5	01	02	01	01	0027	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Benda Pos				100,000
5	01	02	01	01	0029	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Komputer				573,800
5	01	02	01	01	0052	Belanja Makan dan Minuman Rapat				400,000
5	1	02	02	01	0071	Belanja Lembur				1,960,000
5	01	02	04	01	0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota				2,960,000

5	02	01	2.03	06		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			14,541,800
5	1	01	03	08	0002	Belanja jasa pengelolaan BMD yang tidak menghasilkan pendapatan				12,000,000
5	1	02	01	01	0024	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor				369,200
5	1	02	01	01	0025	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover				137,800
5	01	02	01	01	0026	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak				260,000
5	01	02	01	01	0027	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Benda Pos				100,000
5	01	02	01	01	0029	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Komputer				274,800
5	1	02	02	01	0071	Belanja Lembur				1,400,000
5	02	01	2.04			Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah				541,595,914
5	02	01	2.04	01		Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Tersedianya Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah			538,659,214
						MESS JAKARTA				
5	1	02	01	01	0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas				1,500,000
5	1	02	01	01	0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas				300,000
5	1	02	01	01	0031	Belanja Alat/Bahn untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik				5,000,000
5	1	02	01	01	0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya				74,800
5	1	02	01	01	0030	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor				44,000
5	1	02	01	01	0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk kegiatan kantor lainnya				929,200
5	1	02	02	01	0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi				60,000,000
5	1	02	02	01	0033	Belanja Jasa Tenaga Supir				84,000,000
5	1	02	02	01	0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan				60,000,000
5	1	02	02	01	0060	Belanja Tagihan Air				12,001,500
5	1	02	02	01	0061	Belanja Tagihan Listrik				55,000,816
5	1	02	02	01	0063	Belanja Kawat Faksimili / Internet/TV Berlangganan				14,400,000

5	1	02	02	01	0027	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos				2,400,000
5	1	02	02	01	0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan				20,950,000
5	1	02	03	02	0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan				25,000,000
5	1	02	03	02	0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan- Alat Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang				15,000,000
5	1	02	03	03	0001	Belanja Pemeliharaan Barang Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor				3,626,000
						MESS MAKASSAR				
5	1	02	01	01	0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas				1,000,000
5	1	02	01	01	0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas				300,000
5	1	02	01	01	0031	Belanja Alat/Bahn untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik				5,000,000
5	1	02	01	01	0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya				112,200
5	1	02	01	01	0030	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor				44,000
5	1	02	01	01	0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk kegiatan kantor lainnya				1,050,200
5	1	02	02	01	0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi				14,400,000
5	1	02	02	01	0033	Belanja Jasa Tenaga Supir				18,000,000
5	1	02	02	01	0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan				24,000,000
5	1	02	02	01	0060	Belanja Tagihan Air				20,000,250
5	1	02	02	01	0061	Belanja Tagihan Listrik				51,000,248
5	1	02	02	01	0063	Belanja Kawat Faksimili / Internet/TV Berlangganan				6,600,000
5	1	02	02	01	0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan				13,200,000
5	1	02	03	02	0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan- Alat Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang				3,000,000
5	1	02	03	03	0001	Belanja Pemeliharaan Barang Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor				3,626,000

5	2	02	05	02	0006	Alat Rumah Tangga Lainnya				17,100,000
5	02	01	2.04	07		Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah			2,936,700
						MESS JAKARTA				
5	1	02	01	01	0024	Belanja Alat/Bahn untuk Kegiatan Kantor-ATK				271,050
5	1	02	01	01	0025	Belanja Alat/Bahn untuk Kegiatan Kantor-kertas dan Cover				280,800
5	1	02	01	01	0026	Belanja Alat/Bahn untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak				390,000
5	1	02	01	01	0029	Belanja Alat/Bahn untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer				624,000
						MESS JAKARTA				
5	1	02	01	01	0024	Belanja Alat/Bahn untuk Kegiatan Kantor-ATK				271,050
5	1	02	01	01	0025	Belanja Alat/Bahn untuk Kegiatan Kantor-kertas dan Cover				280,800
5	1	02	01	01	0026	Belanja Alat/Bahn untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak				195,000
5	1	02	01	01	0029	Belanja Alat/Bahn untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer				624,000
5	02	01	2.05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN dengan predikat kinerja baik berdasarkan hasil penilaian Perjanjian Kinerja			35,042,500
5	02	01	2.05	09		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			22,200,000
5	1	02	02	12	0004	Belanja Diklat Kepemimpinan				22,200,000
5	02	01	2.05	11		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			12,842,500
5	1	02	02	12	0003	Belanja Bimbingan Teknis				5,000,000
5	1	02	04	01	0001	Luar Daerah (Luar Provinsi/DKI Jakarta)				7,842,500
5	02	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase pemenuhan administrasi perkantoran			498,129,800
5	02	01	2.06	01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			3,555,400
5	1	02	01	01	0031	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat listrik				3,555,400
5	02	01	2.06	02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor			63,780,000

5	1	02	01	01	0003	Belanja Modal Peralatan Personal Komputer				23,130,000
5	2	02	05	02	0004	Belanja Modal Alat Pendingin				17,550,000
5	2	02	05	01	0004	Belanja Modal Alat Penyimpinan Perlengkapan Kantor				3,100,000
5	2	02	10	01	0002	Belanja Modal Personal Komputer				20,000,000
5	02	01	2.06	04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor			33,779,250
5	1	02	01	01	0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura				33,779,250
5	02	01	2.06	05		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan			134,430,000
5	1	02	01	01	0026	Belanja Alat /Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak				134,430,000
5	02	01	2.06	06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			56,400,000
5	1	02	02	01	0055	Belanja Jasa Iklan/ Reklame, Film Dan Pemotretan				32,400,000
5	1	02	02	01	0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalan				24,000,000
5	02	01	2.06	07		Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya Bahan/Material			23,531,150
5	1	02	01	01	0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya				946,400
5	1	02	01	01	0030	Belanja Bahan-Bahan Lainnya				1,052,000
5	1	02	01	01	0024	Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis kantor				4,531,150
5	1	02	01	01	0025	Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor -Kertas Dan Cover				5,590,000
5	1	02	01	01	0026	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-Bahan Cetak				2,501,600
5	1	02	01	01	0027	Belanja Alat/bahan Kegiatan kantor-Benda pos				500,000
5	1	02	01	01	0029	Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor -Kertas Komputer				8,410,000
5	02	01	2.06	08		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu			17,000,000
5	1	02	01	01	0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu				17,000,000
5	02	01	2.06	09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			165,654,000
5	01	02	01	01	0052	Belanja Makan dan Minuman Rapat				14,500,000
5	1	02	04	01	0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Jakarta)				99,514,000
5	1	02	04	01	0003	Belanja Perjalanan dalam Kota				51,640,000

5	02	01	2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	cakupan penyelenggara penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan jasa			2,800,631,256
5	02	01	2.08	1		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat			16,800,000
5	1	02	02	01	0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi				16,800,000
5	02	01	2.08	02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			2,598,831,256
5	1	02	02	01	0059	Belanja Tagihan telepon				36,175,260
5	1	02	02	01	0060	Belanja Tagihan Air				3,375,000
5	1	02	02	01	0061	Belanja Tagihan Listrik				2,500,000,996
5	1	02	02	01	0063	Belanja Kawat Faksimili / Internet/TV Berlangganan				59,280,000
5	02	01	2.08	03		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			6,200,000
5	1	02	03	02	0121	Belanja pemeliharaan Alat kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah tangga Alat pendingin				2,500,000
5	1	02	03	02	0405	Belanja pemeliharaan Komputer-komputer Unit personal Computer				3,700,000
5	02	01	2.08	4		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor			178,800,000
5	1	02	02	01	0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi				70,800,000
5	1	02	02	01	0027	Belanja jasa Tenaga Operator Computer				36,000,000
5	1	02	02	01	0033	Belanja jasa Tenaga Supir				18,000,000
5	1	02	02	01	0046	Belanja Jasa Konersi Aplikasi/ Sistem Informasi				54,000,000
5	02	01	2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penyelenggaraan administrasi barang milik daerah pada SKPD			128,375,000
5	02	01	2.09	02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			128,375,000
5	1	02	01	01	0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas				45,875,000
5	1	02	02	01	0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea Dan Perizinan				17,500,000
5	1	02	03	02	0036	Belanja Pemeiharaan Alat Angkutan Darat Bermotor				65,000,000

5	0 2	04				PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Cakupan penyelenggaraan administrasi barang milik daerah pada SKPD			2,141,332,9 00
5	0 2	04	2			Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah				2,141,332,9 00
5	0 2	04	2	0 1		Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Tersedianya Rencana Pengelolaan Pajak Daerah			26,051,500
5	1	02	01	0 1	002 4	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor				497,900
5	1	02	01	0 1	002 5	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover				234,000
5	0 1	02	01	0 1	002 6	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak				260,000
5	0 1	02	01	0 1	002 7	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Benda Pos				60,000
5	0 1	02	01	0 1	002 9	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Komputer				1,511,600
5	0 1	02	01	0 1	005 2	Belanja Makan dan Minuman Rapat				2,400,000
5	0 1	02	04	0 1	000 1	Belanja Perjalanan Dinas Biasa				9,888,000
5	1	02	04	0 1	000 3	Belanja Perjalanan dalam Kota				11,200,000
5	0 2	04	2	0 2		Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Tersedianya Hasil Analis Pajak Daerah serta Terlaksananya Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah			102,113,40 0
						Penyusunan Perda Pajak dan Retribusi Daerah				56,222,800
5	1	02	01	0 1	002 4	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor				655,200
5	1	02	01	0 1	002 5	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover				234,000
5	0 1	02	01	0 1	002 6	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak				292,500
5	0 1	02	01	0 1	002 7	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Benda Pos				120,000
5	0 1	02	01	0 1	002 9	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Komputer				1,361,600
5	0 1	02	01	0 1	005 2	Belanja Makan dan Minuman Rapat				8,100,000
5	1	02	02	0 1	004 3	Belanja Jasa Penulisan dan Penerjemahan				0
5	1	02	02	0 1	007 1	Belanja Lembur				8,820,000
5	1	02	04	0 1	000 1	Belanja Perjalanan Dinas Biasa				11,040,000

5	1	02	04	01	0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa				25,599,500
						Penyusunan Perbup Pajak dan Retribusi Daerah				21,096,000
5	1	02	01	01	0024	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor				756,600
5	1	02	01	01	0025	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover				397,800
5	1	02	01	01	0026	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak				260,000
5	1	02	01	01	0027	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Benda Pos				60,000
5	1	02	01	01	0029	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Komputer				1,361,600
5	1	02	01	01	0052	Belanja Makan dan Minuman Rapat				2,920,000
5	1	02	02	01	0071	Belanja Lembur				7,980,000
5	1	02	04	01	0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa				7,360,000
						Penyusunan SOP Pajak dan Retribusi Daerah				24,794,600
5	1	02	01	01	0024	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor				455,000
5	1	02	01	01	0025	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover				234,000
5	1	02	01	01	0026	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak				364,000
5	1	02	01	01	0027	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Benda Pos				120,000
5	1	02	01	01	0029	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Komputer				1,361,600
5	1	02	01	01	0052	Belanja Makan dan Minuman Rapat				4,300,000
5	1	02	02	01	0071	Belanja Lembur				11,760,000
5	1	02	02	01	0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia				6,200,000
5	02	04	2	03		Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Terlaksananya Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah			65,984,450
5	1	02	01	01	0024	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor				343,850
5	1	02	01	01	0025	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover				163,800

						Kantor - Kertas dan Cover				
5	1	02	01	01	0026	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak				38,520,000
5	1	02	01	01	0027	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Benda Pos				120,000
5	1	02	01	01	0029	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Komputer				1,236,800
5	1	02	01	01	0052	Belanja Makan dan Minuman Rapat				4,000,000
5	1	02	04	01	0003	Belanja Perjalanan dalam Kota				21,600,000
5	02	04	2	04		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah			19,100,000
5	1	02	01	01	0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik				6,500,000
5	1	02	02	01	0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Computer				12,000,000
5	1	02	04	01	0003	Belanja Perjalanan dalam Kota				600,000
5	02	04	2	05		Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Tersedianya Data Objek Pajak, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah			599,033,250
						Pendataan dan Pemutakhiran Wajib Pajak Daerah (8 Jenis Pajak Daerah)				63,086,750
5	1	02	01	01	0024	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor				720,850
5	1	02	01	01	0025	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover				301,600
5	1	02	01	01	0026	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak				487,500
5	1	02	01	01	0027	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Benda Pos				120,000
5	1	02	01	01	0029	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Komputer				1,236,800
5	1	02	01	01	0052	Belanja Makan dan Minuman Rapat				2,700,000
5	1	02	02	01	0026	Belanja Tenaga Administrasi				25,200,000
5	1	02	02	01	0027	Belanja jasa tenaga Operator komputer				24,000,000
5	1	02	02	01	0071	Belanja Lembur				2,520,000
5	1	02	04	01	0003	Belanja Perjalanan dalam Kota				5,800,000
						UPTD I				7,404,800
5	1	02	01	01	0024	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor				371,800

5	1	02	01	01	0025	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover				301,600
5	1	02	01	01	0026	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak				585,000
5	1	02	01	01	0027	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Benda Pos				120,000
5	1	02	01	01	0029	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Komputer				1,486,400
5	1	02	01	01	0052	Belanja Makan dan Minuman Rapat				1,000,000
5	1	02	04	01	0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota				3,540,000
						UPTD II				9,784,300
5	1	02	01	01	0024	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor				510,900
5	1	02	01	01	0025	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover				371,800
5	1	02	01	01	0026	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak				780,000
5	1	02	01	01	0027	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Benda Pos				120,000
5	1	02	01	01	0029	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Komputer				1,361,600
5	1	02	01	01	0052	Belanja Makan dan Minuman Rapat				1,600,000
5	1	02	04	01	0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota				5,040,000
						UPTD III				9,278,600
5	1	02	01	01	0024	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor				374,400
5	1	02	01	01	0025	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover				301,600
5	1	02	01	01	0026	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak				780,000
5	1	02	01	01	0027	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Benda Pos				120,000
5	1	02	01	01	0029	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Komputer				1,062,600
5	1	02	01	01	0052	Belanja Makan dan Minuman Rapat				1,600,000
5	1	02	04	01	0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota				5,040,000
						UPTD IV				9,478,800
5	1	02	01	01	0024	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor				395,200

						Kantor - Alat Tulis Kantor				
5	1	02	01	01	0025	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover				442,000
5	1	02	01	01	0026	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak				520,000
5	1	02	01	01	0027	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Benda Pos				120,000
5	1	02	01	01	0029	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Komputer				1,361,600
5	1	02	01	01	0052	Belanja Makan dan Minuman Rapat				1,600,000
5	1	02	04	01	0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota				5,040,000
						Pendataan dan Pemutakhiran Data PBB-P2				500,000,000
5	2	05	08	01	0006	Belanja Modal Kajian				500,000,000
5	02	04	2	06		Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Pajak Daerah	Terlaksananya Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan basis Pajak Daerah			100,458,150
5	1	02	01	01	0024	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor				623,350
5	1	02	01	01	0025	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover				572,000
5	1	02	01	01	0026	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak				325,000
5	1	02	01	01	0027	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Benda Pos				100,000
5	1	02	01	01	0029	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Komputer				937,800
5	1	02	01	01	0052	Belanja Makan dan Minuman Rapat				2,700,000
5	1	02	02	01	0071	Belanja Lembur				3,080,000
5	1	02	02	01	0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Computer				36,000,000
5	1	02	04	01	0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota				6,120,000
5	1	02	03	06	0005	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Software				50,000,000
5	02	04	2	07		Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas tanah dan Bangunan	Terpenuhinya Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya			511,848,000
5	1	02	01	01	0029	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan				150,000

						Kantor - Bahan Komputer				
5	1	02	01	01	0026	Belanja Alat/Bahan Kegiatan Kantor-Bahan Cetak				78,500,000
5	1	02	01	01	0052	Belanja Makan dan Minuman Rapat				13,650,000
5	1	02	02	01	0071	Belanja Lembur				4,340,000
5	1	02	02	01	0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi				138,000,000
5	1	02	02	10	0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang				150,000,000
5	1	02	04	01	0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa				9,888,000
5	1	02	04	01	0003	Belanja Perjalanan dalam Kota				17,320,000
5	1	02	05	01	0002	Belanja Penghargaan atau Suatu Prestasi				100,000,000
5	02	04	2	08		Penetapan Wajib Pajak Daerah	Tersedianya Dokumen Ketetapan Pajak Daerah			53,286,100
5	1	02	01	01	0024	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor				475,800
5	1	02	01	01	0025	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover				208,000
5	1	02	01	01	0026	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak				292,500
5	1	02	01	01	0027	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Benda Pos				120,000
5	1	02	01	01	0029	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Komputer				937,800
5	1	02	01	01	0052	Belanja Makan dan Minuman Rapat				3,500,000
5	1	02	02	01	0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer				12,000,000
5	1	02	02	01	0071	Belanja Lembur				10,920,000
5	1	02	04	01	0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa				16,672,000
5	1	02	04	01	0003	Belanja Perjalan Dinas Dalam Kota				8,160,000
5	02	04	2	09		Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Tersedianya Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah			45,684,750
						Pelayanan dan konsultasi 8 Jenis pajak Daerah				4,343,750
5	1	02	01	01	0024	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor				778,700
5	1	02	01	01	0025	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover				416,000
5	1	02	01	01	0026	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan				585,000

						Kantor - Bahan Cetak				
5	1	02	01	01	0027	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Benda Pos				120,000
5	1	02	01	01	0029	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Komputer				1,361,600
5	1	02	01	01	0043	Belanja Natura dan pakan-Natura				1,082,450
						Pelayanan dan Konsultasi PBB-P2 dan BPHTB				41,341,000
5	1	02	01	01	0024	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor				10,948,300
5	1	02	01	01	0025	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover				275,600
5	1	02	01	01	0026	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak				292,500
5	1	02	01	01	0027	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Benda Pos				100,000
5	1	02	01	01	0029	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Komputer				2,024,600
5	1	02	01	01	0029	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Komputer				3,700,000
5	1	02	02	01	0027	Belanja Jasa Tenaga Komputer				24,000,000
5	02	04	2	10		Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Terlaksananya Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah			33,686,600
5	1	02	01	01	0024	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor				1,040,000
5	1	02	01	01	0025	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover				208,000
5	1	02	01	01	0026	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak				585,000
5	1	02	01	01	0027	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Benda Pos				120,000
5	1	02	01	01	0029	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Komputer				1,725,600
5	1	02	01	01	0052	Belanja Makan dan Minuman Rapat				3,500,000
5	1	02	02	01	0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer				12,000,000
5	1	02	02	01	0071	Belanja Lembur				4,620,000
5	1	02	04	01	0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa				
						Luar Daerah (Provinsi/Makassar)				9,888,000

5	0 2	04	2	1 1		Penagihan Pajak Daerah	Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah			351,323,150
						Penagihan Piutang 8 Jenis Pajak Daerah				17,417,050
5	1	02	01	0 1	002 4	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor				437,450
5	1	02	01	0 1	002 5	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover				234,000
5	1	02	01	0 1	002 6	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak				624,000
5	1	02	01	0 1	002 7	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Benda Pos				120,000
5	1	02	01	0 1	002 9	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Komputer				1,361,600
5	1	02	01	0 1	005 2	Belanja Makan dan Minuman Rapat				2,400,000
5	1	02	04	0 1	000 3	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota				12,240,000
						UPTD I				58,894,200
5	1	02	01	0 1	002 4	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-ATK				793,000
5	1	02	01	0 1	002 5	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-kertas dan Cover				377,000
5	1	02	01	0 1	002 6	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-kertas dan Cover				150,000
5	1	02	01	0 1	002 7	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Benda Pos				120,000
5	1	02	01	0 1	002 9	Belanja Alat/Bahn untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer				1,398,000
5	1	02	01	0 1	003 6	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya				674,800
5	1	02	01	0 1	001 2	Belanja Bahan-Bahan Lainnya				37,400
5	1	02	01	0 1	005 2	Belanja Makanan dan Minuman Rapat				1,600,000
5	1	02	02	0 1	002 6	Belanja Jasa Tenaga Administrasi				33,600,000
5	1	02	02	0 1	002 7	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer				12,000,000
5	1	02	04	0 1	000 1	Belanja Perjalanan Dinas Biasa				3,104,000
5	1	02	04	0 1	000 3	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota				5,040,000
						UPTD II				76,564,300
5	1	02	01	0 1	002 4	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-ATK				942,500
5	1	02	01	0 1	002 5	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-kertas dan Cover				15,846,000

5	1	02	01	01	0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-kertas dan Cover				150,000
5	1	02	01	01	0027	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Benda Pos				120,000
5	1	02	01	01	0029	Belanja Alat/Bahn untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer				1,548,000
5	1	02	01	01	0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya				701,600
5	1	02	01	01	0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya				112,200
5	1	02	01	01	0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat				1,600,000
5	1	02	02	01	0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi				33,600,000
5	1	02	02	01	0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer				12,000,000
5	1	02	04	01	0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa				3,104,000
5	1	02	04	01	0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota				6,840,000
						UPTD III				86,482,400
5	1	02	01	01	0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-ATK				306,800
5	1	02	01	01	0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-kertas dan Cover				192,400
5	1	02	01	01	0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-kertas dan Cover				150,000
5	1	02	01	01	0027	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Benda Pos				100,000
5	1	02	01	01	0029	Belanja Alat/Bahn untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer				1,698,000
5	1	02	01	01	0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya				435,100
5	1	02	01	01	0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya				56,100
5	1	02	01	01	0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat				1,600,000
5	1	02	02	01	0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi				58,800,000
5	1	02	02	01	0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer				12,000,000
5	1	02	04	01	0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa				3,104,000
5	1	02	04	01	0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota				8,040,000
						UPTD IV				111,965,200
5	1	02	01	01	0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-ATK				632,450

5	1	02	01	01	0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-kertas dan Cover				192,400
5	1	02	01	01	0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-kertas dan Cover				150,000
5	1	02	01	01	0027	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Benda Pos				120,000
5	1	02	01	01	0029	Belanja Alat/Bahn untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer				1,398,000
5	1	02	01	01	0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya				352,250
5	1	02	01	01	0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya				56,100
5	1	02	01	01	0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat				1,920,000
5	1	02	02	01	0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi				84,000,000
5	1	02	02	01	0027	Belanja Jasa Tenaga Administrasi				12,000,000
5	1	02	04	01	0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa				3,104,000
5	1	02	04	01	0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota				8,040,000
5	02	04	2	12		Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Terlaksananya Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah			2,660,400
5	1	02	01	01	0025	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover				140,400
5	1	02	01	01	0052	Belanja Makan dan Minuman Rapat				480,000
5	1	02	04	01	0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota				2,040,000
5	02	04	2	13		Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Terlakananya Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah			108,131,200
						Optimalisasi Penarikan Tambang/Penyuluhan Hukum Wajib Pajak dan Retribusi Daerah				22,444,750
5	1	02	01	01	0024	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor				911,950
5	1	02	01	01	0025	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover				556,400
5	1	02	01	01	0026	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak				1,170,000
5	1	02	01	01	0027	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Benda Pos				200,000
5	1	02	01	01	0029	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan				1,486,400

						Kantor - Bahan Komputer				
5	1	02	04	01	0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota				18,120,000
						MONITORING PENDAPATAN DAERAH (Bidang P2)				16,566,450
5	1	02	01	01	0024	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor				1,217,450
5	1	02	01	01	0025	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover				904,800
5	1	02	01	01	0026	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak				1,365,000
5	1	02	01	01	0027	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Benda Pos				200,000
5	1	02	01	01	0029	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Komputer				2,424,200
5	1	02	04	01	0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota				10,455,000
						PENGAWASAN, PEMERIKSAAN DAN PENDAMPINGAN PENDAPATAN DAERAH				66,720,000
5	1	02	02	01	0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia				50,400,000
5	1	02	04	01	0003	Belanja Perjalanan dinas dalam kota				16,320,000
5	02	04	2	14		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah			84,669,800
						Analisa dan Pengembangan Potensi Pendapatan Daerah				5,850,050
5	1	02	01	01	0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-ATK				606,450
5	1	02	01	01	0025	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover				208,000
5	1	02	01	01	0026	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak				390,000
5	1	02	01	01	0027	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Benda Pos				120,000
5	1	02	01	01	0029	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Komputer				1,725,600
5	1	02	01	01	0052	Belanja Makan dan Minuman Rapat				2,800,000

						Koordinasi dan Monitoring Optimalisasi Penerimaan Retribusi Daerah				31,781,000
5	1	02	04	01	0001	Luar Daerah (Luar Provinsi/DKI Jakarta)				16,837,000
5	1	02	04	01	0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa				
						Luar Daerah (Provinsi/Makassar)				6,784,000
5	1	02	04	01	0003	Belanja Perjalanan dinas dalam kota				8,160,000
						Pembukuan dan Verifikasi Data Retribusi Daerah				30,892,900
5	1	02	01	01	0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-ATK				1,210,300
5	1	02	01	01	0025	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover				416,000
5	1	02	01	01	0026	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak				585,000
5	1	02	01	01	0027	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Benda Pos				120,000
5	1	02	01	01	0029	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Komputer				1,361,600
5	1	02	01	01	0052	Belanja Makan dan Minuman Rapat				3,200,000
5	1	02	02	01	0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer				24,000,000
						Penyusunan Laporan Penerimaan Retribusi Daerah				9,017,800
5	1	02	01	01	0024	Belanja Alat/ Bahan Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor				980,200
5	1	02	01	01	0025	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover				416,000
5	1	02	01	01	0026	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak				390,000
5	1	02	01	01	0027	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Benda Pos				120,000
5	1	02	01	01	0029	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Komputer				1,361,600
5	1	02	01	01	0052	Belanja Makan dan Minuman Rapat				1,970,000
5	1	02	02	01	0071	Belanja Lembur				3,780,000
						Rapat evaluasi penerimaan retribusi Daerah				7,128,050
5	1	02	01	01	0024	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor				657,150

5	1	02	01	01	0025	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover				275,600
5	1	02	01	01	0026	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak				357,500
5	1	02	01	01	0027	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Benda Pos				100,000
5	1	02	01	01	0029	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Komputer				937,800
5	1	02	01	01	0052	Belanja Makan dan Minuman Rapat				4,800,000
5	02	04	2	15		Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Terlaksananya Upaya Mengubah Transaksi Tunai menjadi Non Tunai			37,302,150
						Sosialisasi dan edukasi pelaksanaan ETPD				19,620,900
5	1	02	01	01	0024	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor				620,100
5	1	02	01	01	0025	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover				208,000
5	1	02	01	01	0026	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak				13,885,000
5	1	02	01	01	0027	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Benda Pos				120,000
5	1	02	01	01	0029	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Komputer				787,800
5	1	02	01	01	0052	Belanja Makan dan Minuman Rapat				4,000,000
						Rapat Koordinasi ETPD				7,101,000
5	1	02	01	01	0024	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor				336,700
5	1	02	01	01	0025	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover				234,000
5	1	02	01	01	0026	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak				292,500
5	1	02	01	01	0027	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Benda Pos				100,000
5	1	02	01	01	0029	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Komputer				937,800
5	1	02	01	01	0052	Belanja Makan dan Minuman Rapat				1,200,000
5	1	02	02	01	0003	Honorarium Narasumber				4,000,000
						Kegiatan Penunjang Operasional Kesekretariatan TP2DD				10,580,250

5	1	02	01	01	0024	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-ATK				235,950
5	1	02	01	01	0025	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover				234,000
5	1	02	01	01	0026	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak				292,500
5	1	02	01	01	0027	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Benda Pos				100,000
5	1	02	01	01	0029	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Komputer				787,800
5	1	02	01	01	0052	Belanja Makan dan Minuman Rapat				1,370,000
5	1	02	02	01	0071	Belanja Lembur				7,560,000

Tabel 4. 2 Rincian Belanja Pada setiap sub kegiatan

Untuk tercapainya target dari setiap indikator kinerja dibutuhkan pendanaan untuk membiayai masing-masing kegiatan, kebutuhan pendanaan tahun anggaran 2024 pada Badan Pendapatan Daerah direncanakan Sebesar **Rp 12.969.719.080,00 (Dua Belas Milliyar Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Sembilan Belas Ribu Delapan Puluh Rupiah).**

BAB V

PENUTUP

Penyusunan Rencana kerja ini dengan tujuan untuk menentukan acuan dan arahan pembangunan di bidang pendapatan Kabupaten Luwu. Penyusunan ini tidak lepas dari tujuan dan sasaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu yang telah ditetapkan.

Proses Penyusunan Renja ini memerlukan adanya keterlibatan dari berbagai pihak terkait, sehingga semua komponen dilingkungan Badan pendapatan Daerah Kabupapten Luwu ikut terapresiasi dan terwakili, juga ikut bertanggung jawab terhadap program kerja yang yang direncanakan.

Optimalisasi dalam pelaksanaan isi renja merupakan hal penting yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan wewenang urusan perencanaan pembangunan dan statistik yang di emban oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu.

Semoga Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2024 ini dapat dijadikan acuan semua pihak untuk melaksanakan Program Kegiatan dengan Sebaik-baiknya.

Belopa,
Kepala BAPENDA KAB. LUWU


ANDI TALANGGI, S.STP
PKT. PEMBINA TINGKAT I
NIP.198311142003121001